



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN TAHUNAN PPN PEMANGKAT TAHUN 2023



kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tahun 2023 ini dapat terselesaikan. Laporan tahunan ini adalah merupakan refleksi dan gambaran realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dan juga merupakan tolak ukur dari pelaksanaan tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020. Tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pembangunan dan operasional PPN Pemangkat sekaligus sebagai bahan informasi dalam penentuan kebijakan serta perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan laporan tahunan ini masih belum sempurna, oleh karena itu diperlukan saran untuk penyempurnaan laporan diwaktu mendatang sangat dihargai. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pemangkat, 15 Maret 2024

Kepala PPN Pemangkat



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Anam Tofani, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	v
Ruang Lingkup (Sistematika)	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Kedudukan	3
1.4 Visi	3
1.5 Misi	4
1.6 Tujuan dan Sasaran Program	4
1.7 Organisasi & Kepegawaian	7
Bagan Struktur Organisasi	10
Sumber Daya Manusia	11
Pengembangan Pegawai	12
Pengembangan Kompetensi Pegawai	13
Budaya Kerja Pegawai	13
Kegiatan K-5	14
Kehumasan	17
II. KINERJA DAN ANGGARAN	
2.1 Kinerja Anggaran	20
2.2 Alokasi Anggaran	20
2.3 Realisasi Anggaran	22
2.4 Peningkatan Peralatan Perkantoran	22
III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
3.1 Penerimaan PNBP	24
3.2 Volume Produksi Perikanan Tangkap	27
3.3 Tingkat Kinerja	29
3.4 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	32
3.5 Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas	34

DAFTAR ISI

III. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

3.6	Kapal Perikanan Izin Daerah	36
3.7	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	38
3.8	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat	40
3.9	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	42
3.10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	45
3.11	Nilai SKM Lingkup PPN Pemangkat	47

IV. KEGIATAN KESYAHBANDARAN, OPERASIONAL & PENGUSAHAAN

4.1	Pengawasan Kapal	51
4.2	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	52
4.3	Logbook Penangkapan Ikan	53
4.4	Pelayanan Penerbitan SKKP	54
4.5	Pelayanan SHTI	55
4.6	Asuransi Nelayan & PKL	56
4.7	SCPIB & SKN	57
4.8	Frekuensi Kapal Bongkar	58
4.9	Produksi Perikanan	59
4.10	Inspeksi Pembongkaran Ikan	62
4.11	Pengawasan & Pengujian Mutu	64
	Pengujian Mutu Hasil Perikanan	66
	Pembongkaran Hasil Tangkapan	68
4.12	Pelayanan Air Bersih	70
4.13	Pemanfaatan Lahan & Bangunan	71
4.14	Penyerapan Tenaga Kerja	73
4.15	Pelayanan Pas Masuk	73
4.16	Pelaksanaan PIPP	76
4.17	Penilaian Evaluasi Kinerja	78

DAFTAR ISI

V. INOVASI, CAPAIAN & KEGIATAN TAHUN 2023

5.1 Inovasi “Terjala”	81
5.2 Penghargaan PPN Pemangkat	83
5.3 Dokumentasi Kegiatan	85

VI. PENUTUP

6.1 Penutup	99
-------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian kinerja anggaran PPN Pemangkat 2023	101
Lampiran 2. Penganggaran Kegiatan PPN Pemangkat 2023	102
Lampiran 3. Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA. 2023	103
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA. 2023	104
Lampiran 5. Pelayanan SPB Periode Tahun 2023	105
Lampiran 6. Pelayanan Log book Periode Tahun 2023	106
Lampiran 7. Pelayanan Penerbitan SKKP Periode Tahun 2023	107
Lampiran 8. Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	108
Lampiran 9. Pelayanan Perjanjian Kerja Laut (PKL)	109
Lampiran 10. Asuransi Nelayan Periode Tahun 2023	110
Lampiran 11. Frekuensi Kunjungan Kapal Periode Tahun 2023	111
Lampiran 12. Frekuensi Kapal Bongkar Periode Tahun 2023	112
Lampiran 13. Data Kapal yang diinspeksi Periode Tahun 2023	113
Lampiran 14. SK Daftar Pelabuhan Binaan	114

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2023 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan berbagai peningkatan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan anggaran dan kegiatan, inovasi, dan berbagai penghargaan yang telah didapatkan selama tahun 2023.

Secara umum kinerja PPN Pemangkat tahun 2023 dapat di katakan BAIK, dengan peningkatan secara signifikan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2023.

Peningkatan kinerja signifikan ini tidak terlepas dari dukungan anggaran yang berasal dari APBN Murni yang ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan pagu RP. 12.426.857.00,-.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai Unit Pelayanan Publik, terus berupaya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada stakeholder. Peningkatan integritas dan kualitas pelayanan dengan mengusung core value dan jargon SMART (Sinergi, Melayani, Akuntabel, Responsif, Tanggung Jawab) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan.

RUANG LINGKUP (SISTEMATIKA)

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2023 merupakan refleksi pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selama kurun waktu Tahun 2023. Adapun sistematika penyajian Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2023 sebagai berikut:

- **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada bagian ini disajikan secara ringkas kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selama kurun waktu satu tahun.

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang tugas dan fungsi serta penjelasan secara umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, bagan organisasi, kepegawaian, dan kehumasan.

- **BAB II KINERJA DAN ANGGARAN**

Menguraikan secara singkat alokasi, target, dan realisasi anggaran tahun 2023.

- **BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Menguraikan capaian-capaian dan analisa pada beberapa indikator kinerja PPN Pemangkat.

- **BAB IV INOVASI, CAPAIAN, DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

Menguraikan Inovasi, Capaian/penghargaan yang diraih, serta pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023.

- **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian target serta strategi pemecahan masalah.

BAB I ***PENDAHULUAN***

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatannya agar dapat terakomodir dan terlaksana dengan baik serta menghasilkan output sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung program utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta dalam rangka menjawab tuntutan dan harapan pengguna jasa dan masyarakat perikanan pada umumnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menyusun suatu rencana yang sistematis, terinci, terarah dan berkesinambungan yang berisikan pernyataan Visi, Misi, tujuan dan sasaran, serta kebijaksanaan program dan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Untuk itu, perlu disusun sebuah laporan tahunan yang merupakan gambaran pelaksanaan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang memuat capaian, kendala serta tindak lanjut atas kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023. Laporan tahunan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan atas kegiatan tahun berikutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.13/MEN/2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04/MEN-KP/KP.430/XII/2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;

1.3 KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN- KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang perubahan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; dan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

1.4 VISI

Selaku Unit Pelaksana Teknis Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengarah pada tujuan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pusat Industri Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat agar Tercapai Pelabuhan Perikanan yang Maju, Berkelanjutan menuju Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera”. Berdasarkan visi tersebut dapat diartikan bahwa kawasan PPN Pemangkat merupakan titik sentral bagi pertumbuhan dan pengembangan kegiatan industri perikanan mulai dari sub sistem penyediaan sarana produksi dan pengolahan hasil perikanan serta sub sistem pemasaran produk. Di sisi lain dalam operasionalnya juga senantiasa mengutamakan pelayanan publik guna mendukung peningkatan produktifitas nelayan dan pengusaha perikanan serta menjaga keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tingkat kelestariannya.

1.5 MISI

Untuk dapat mencapai Visi yang telah ditetapkan, memperhatikan tingkat operasional pelabuhan yang secara nyata telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi perikanan, maka PPN Pemangkat mengemban misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan zona integritas sesuai standar ISO 9001:2015;
2. Peningkatan kompetensi nelayan di pelabuhan perikanan;
3. Peningkatan kontribusi ekonomi melalui investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan;
4. Peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap melalui penyiapan data dan informasi di pelabuhan perikanan yang akurat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembinaan SDM dan pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel.

1.6 TUJUAN & SASARAN PROGRAM

Menjabarkan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap di pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zona integritas (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan penerapan ISO 9001:2015 dengan melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagai alat ukur peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Peningkatan Kompetensi nelayan di PPN Pemangkat dengan melaksanakan bimbingan teknis baik penangkapan ikan, keselamatan pelayaran dan mutu hasil perikanan yang difasilitasi program internal maupun program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Peningkatan investasi dan pelayanan usaha di pelabuhan perikanan dengan melakukan sosialisasi, promosi dan peningkatan fasilitas pelabuhan untuk meningkatkan peluang usaha di PPN Pemangkat;
4. Menyiapkan data dan informasi pelabuhan perikanan yang akurat dengan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas “Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan”.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang Pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan log book penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan perikanan; dan
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.7 ORGANISASI & KEPEGAWAIAN

Susunan dan tata kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terdiri dari:

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sebagai berikut:

- Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
- Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha.

2. Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran

Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- pelaksanaan pemeriksaan Log Book Penangkapan Ikan;
- pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
- pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB);
- pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan
- pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha.

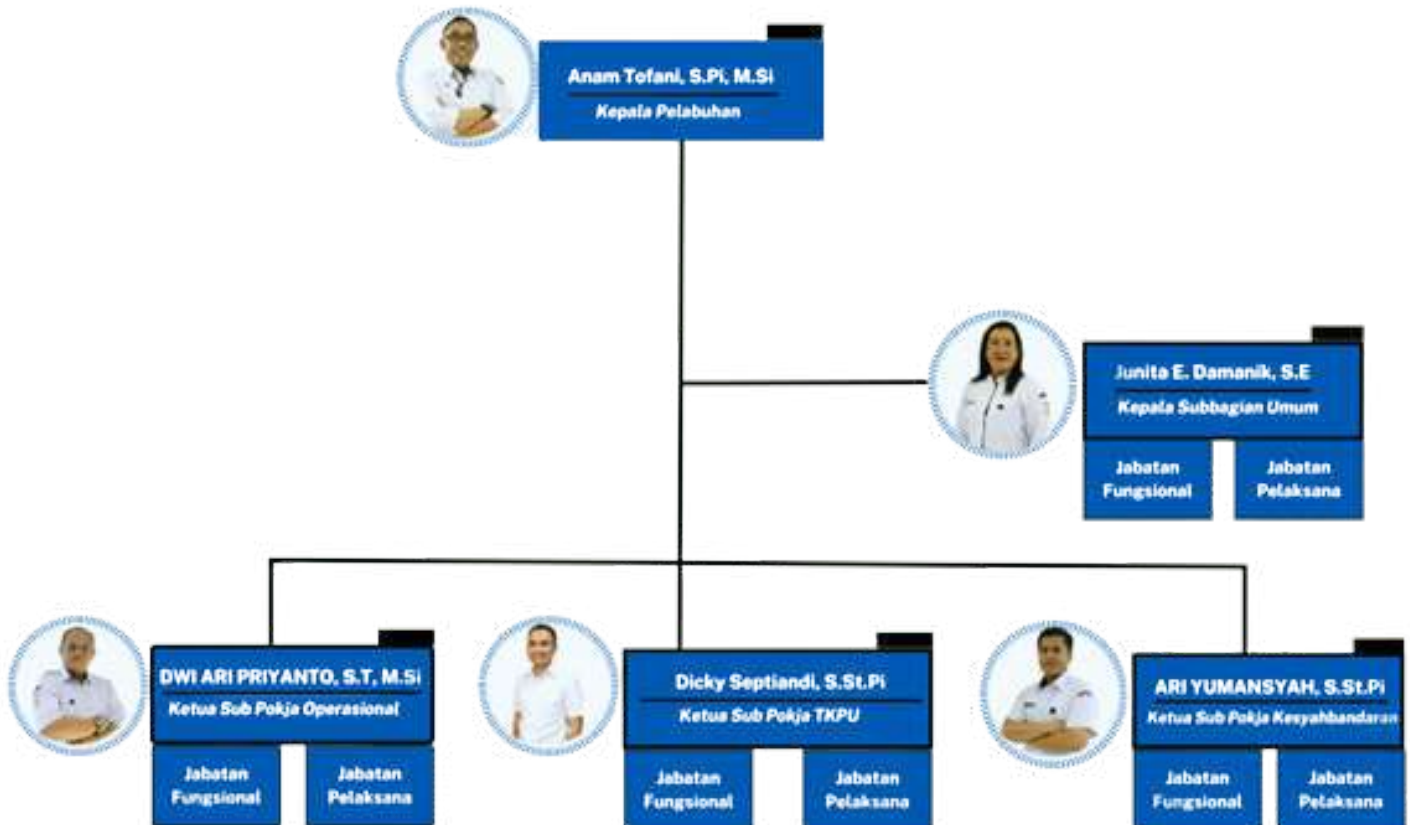
3. Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;
- Bimbingan teknis serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan
- Bimbingan teknis pelayanan usaha.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi PPN Pemangkat Tahun 2023



SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan akhir Tahun 2023, jumlah pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebesar 91 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 46 orang, TKK sebesar 24 dan Outsourcing 21 orang yang dapat dilihat pada gambar berikut:

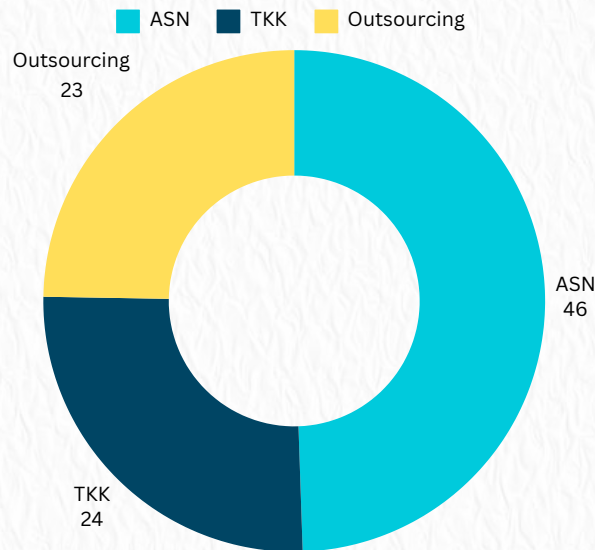


DIAGRAM. 1 KOMPOSISI ASN DI PPN PEMANGKAT

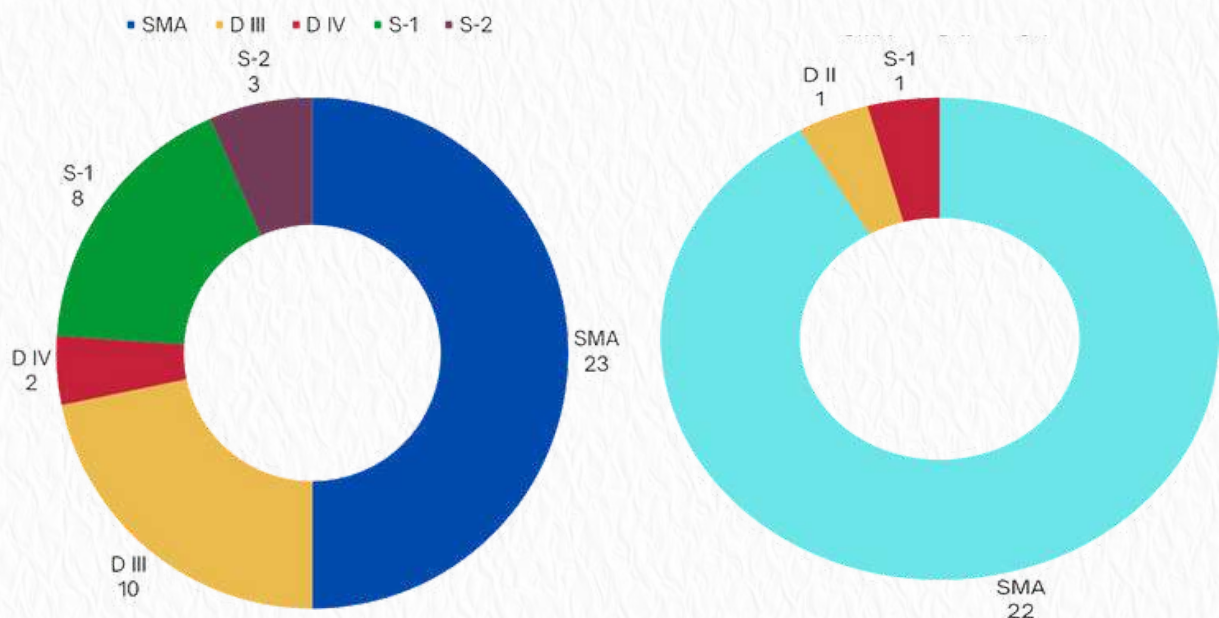


DIAGRAM.2 KOMPOSISI ASN DAN TKK BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pembinaan terhadap pegawai diarahkan untuk meningkatkan Kompetensi melalui berbagai pelatihan/kursus/bimtek dan apresiasi dengan maksud :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas serta menumbuhkan motivasi bagi pegawai.
2. Memberikan pemahaman kepada para staf akan pentingnya disiplin, loyalitas dan tanggung jawab.
3. Memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan karier.
4. Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan melalui pembinaan organisasi pegawai.

Pengembangan Pegawai dilakukan dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, kursus, apresiasi dan workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyesuaian ijazah, mutasi pegawai, serta promosi lainnya diberikan bagi pegawai yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga, terkait kesejahteraan pegawai ditempuh melalui berbagai upaya antara lain:

1. Mendorong pegawai menjadi peserta asuransi kesehatan melalui BPJS;
2. Menyediakan minuman untuk semua pegawai pada jam kerja;
3. Menyediakan pakaian kerja karyawan dan kelengkapannya;
4. Mengikut sertakan tenaga kontrak dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pengembangan kompetensi pegawai merupakan proses yang penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan di dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan berbagai kegiatan dan program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan tujuan organisasi. Berikut beberapa kegiatan peningkatan kompetensi pegawai PPN Pemangkat melalui Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023.



Bimbingan teknis peningkatan kompetensi personil tentang teknik akuisisi foto udara untuk Penyusunan Informasi Geospasial WKOPP, yang dilaksanakan di PPN Kejawan Cirebon 11 s.d 15 September 2023.



Diklat Pengawas Pekerjaan Struktur dan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Makassar, Sulawesi Selatan, 2 Oktober 2023.



Diklat Peningkatan Kompetensi SDM terkait Upgrading sertifikat Keahlian ANKAPIN/ATKAPIN II KE ANKAPIN/ATKAPIN I, di BPPP Tegal dari tanggal 7 Agustus s.d 29 September 2023



Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat I yang diselenggarakan di Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Maret 2023.

BUDAYA KERJA PEGAWAI



Dalam Penerapan Budaya Kerja, PPN Pemangkat selalu menerapkan budaya kerja yang salah satunya diterapkan melalui kegiatan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis di tiap minggunya serta kegiatan senam pagi sebagai wadah keakraban sekaligus penyegaran jasmani dan rohani bagi para pegawai PPN Pemangkat. Pada dasarnya setiap organisasi memiliki budaya kerja yang unik, dan penting bagi kepemimpinan dan manajemen untuk memahami, mengembangkan, dan memelihara budaya yang sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Budaya kerja yang positif dan sehat dapat menjadi aset berharga bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang suatu organisasi.

KEGIATAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA (K-5)

KEBERSIHAN

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan higienis telah dilakukan kegiatan secara rutin meliputi kebersihan lingkungan halaman perkantoran, ruangan kantor, TPI, Balai Pertemuan Neayan, Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT), dermaga lapor kapal, bantaran sungai kaliyasa serta kawasan pos pelayanan terpadu. Penyediaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer serta tisu toilet.



Aktivitas rutinitas kebersihan lingkungan PPN Pemangkat

PPN Pemangkat berhasil meraih peringkat 4 terbaik tingkat UPT Ditjen Perikanan Tangkap terkait pelaksanaan indikator kinerja utama pengendalian fasilitas pelabuhan perikanan tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dalam komitmen menjalankan penerapan kebijakan pada lingkungan; seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim dan minimalisasi dampak lingkungan. Penilaian ini dilakukan setelah terlaksananya ISO 14001:2015 oleh pihak eksternal QAI dengan diterbitkannya surat Catatan Hasil Review yang selanjutnya akan ditindaklanjuti.

Nama Pelabuhan		PPN Pemangkat		
Skor Total	99,46	Skor total setelah Koreksi	89,06	(SANGAT BAIK)
Indikator Program	60	Indikator Program	51,6	
Indikator Hasil	39,46	Indikator Hasil	37,46	
Peringkat awal	5	Peringkat setelah koreksi	3	

Hasil Setelah Penilaian Oleh Tim QAI Indonesia



Sertifikat ISO 14001:2015 dan penilaiin langsung oleh Tim QAI

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kawasan pelabuhan sebagai pusat kegiatan ekonomi maka ditempuh langkah-langkah berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan satuan pengamanan bekerjasama dengan Polres Pemangkat, pelatihan pemadam kebakaran bekerjasama dengan Dinas Pemadam dan melakukan pelatihan mandiri pemadaman kebakaran bagi pegawai, Satpam dan Petugas Kebersihan PPN Pemangkat.



Gambar Alat Penunjang Keselamatan Kerja di PPN Pemangkat

KEHUMASAN

PPN Pemangkat memiliki beberapa layanan kehumasan, diantaranya media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube). Selain itu, layanan informasi PPN Pemangkat bisa diakses baik melalui, telepon, website, maupun email. Serta memiliki sarana pengaduan yang dapat diakses melalui www.website.lapor.go.id.



INSTAGRAM



Instagram PPN Pemangkat memiliki jumlah pengikut sebanyak 949 dengan rata-rata post mingguan sebanyak 12 postingan dan rata-rata disukai sebanyak 30 likes per post.



FACEBOOK



Facebook PPN Pemangkat memiliki jumlah pengikut sebanyak 1400 teman dengan rata-rata post mingguan sebanyak 12 postingan dan rata-rata disukai sebanyak 20 likes per post.



TWITTER



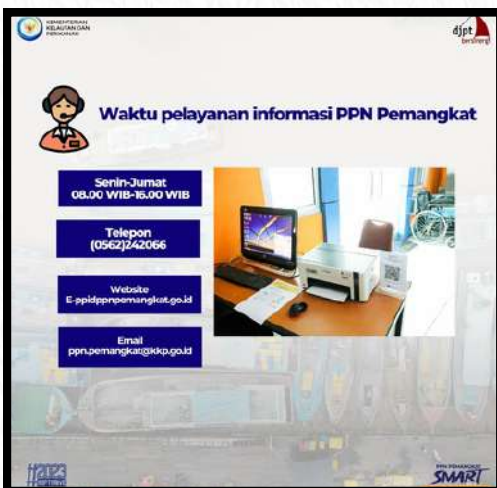
Twitter PPN Pemangkat memiliki jumlah pengikut sebanyak 887 dengan rata-rata post mingguan sebanyak 10 postingan dan rata-rata disukai sebanyak 5 likes per post.

WEBSITE



Masyarakat dapat mencari informasi melalui Website PPN Pemangkat dapat diakses melalui <https://kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat>.

LAYANAN INFORMASI



Waktu operasional layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dapat melalui kanal E-PPID, Telepon, maupun Email.

KANAL PENGADUAN



Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id

BAB II KINERJA DAN ANGGARAN

2.1 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap secara terukur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menetapkan target- target Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian kinerja merupakan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam sasaran kinerja PPN Pemangkat. Capaian kinerja anggaran PPN Pemangkat Tahun 2023 terlampir pada lampiran 1.

2.2 ALOKASI ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, PPN Pemangkat telah diberi alokasi anggaran oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sumber dana pembangunan dalam rangka pelaksanaan program berasal dari APBN Murni yang ditetapkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan pagu awal adalah Rp. 12.788.606.000,- dan pagu akhir setelah serangkaian revisi adalah RP. 12.426.857.00,-. Penganggaran Kegiatan PPN Pemangkat TA. 2023 terlampir pada lampiran 2.

Uraian pada setiap revisi yang terjadi dapat dilihat dibawah ini :

- 1.Revisi I DIPA/RKAKL pada tanggal 27 Desember 2022 terkait pagu blokir alokasi adjustment (AA). Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA);
- 2.Telah melakukan Revisi II DIPA/RKAKL pada tanggal 13 Februari 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun dan update halaman III DIPA. Revisi dilakukan oleh satker PPN Pemangkat (Revisi Kanwil Provinsi Kalimantan Barat).
- 3.Telah melakukan Revisi III DIPA/RKAKL pada tanggal 16 Februari 2023, administrasi, koreksi akun dan update halaman III DIPA.
- 4.Telah melakukan Revisi IV DIPA/RKAKL pada tanggal 17 April 2023 terkait revisi POK,administrasi, koreksi akun dan update halaman III DIPA. Revisi dilakukan oleh satker PPN Pemangkat (Revisi Kanwil Provinsi Kalimantan Barat).

5. Telah melakukan Revisi V DIPA/RKAKL pada tanggal 4 Juli 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun dan update halaman III DIPA. Revisi dilakukan oleh satker PPN Pemangkat (Revisi Kanwil Provinsi Kalimantan Barat).
6. Telah melakukan Revisi VI DIPA/RKAKL pada tanggal 13 Juli 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh SATKER (Revisi KPA).
7. Telah melakukan Revisi VII DIPA/RKAKL pada tanggal 31 Juli 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh SATKER (Revisi KPA).
8. Telah melakukan Revisi VIII DIPA/RKAKL pada tanggal 23 Agustus 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).
9. Telah melakukan Revisi IX DIPA/RKAKL pada tanggal 09 Oktober 2023 terkait revisi pergeseran belanja pegawai dengan pagu tetap, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh satker PPN Pemangkat (Revisi Kanwil Provinsi Kalimantan Barat).
10. Telah melakukan Revisi DIPA (DJA) ke-10 tanggal 19 Oktober 2023 terkait Penghapusan akun blokir AA Revisi dilakukan oleh Eselon 1 (Revisi DJA).
11. Telah melakukan Revisi DIPA (DJA) ke-11 tanggal 01 November 2023 terkait revisi penambahan pagu Belanja Pegawai dalam rangka revisi pagu minus.
12. Telah melakukan Revisi DIPA (Kanwil) ke-12 tanggal 03 November 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).
13. Telah melakukan Revisi DIPA (DJA) ke-13 tanggal 13 Nopember 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).
14. Telah melakukan Revisi Satker (KPA) ke-14 tanggal 27 November 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).
15. Telah melakukan Revisi Satker (KPA) ke-15 tanggal 4 Desember 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).
16. Telah melakukan Revisi Satker (KPA) ke-16 tanggal 5 Desember 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).
17. Telah melakukan Revisi Satker (KPA) ke-17 tanggal 12 Desember 2023 terkait revisi POK, administrasi, koreksi akun. Revisi dilakukan oleh KPA (Revisi KPA).

2.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran PPN Pemangkat Per Jenis Kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. 12.311.736.170,-. Realisasi Anggaran Per Kegiatan PPN Pemangkat TA. 2023 terlampir pada lampiran 3.

Realisasi anggaran PPN Pemangkat Per Jenis Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp. 12.311.736.170,-. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja PPN Pemangkat TA. 2023 terlampir pada lampiran 4.

2.4 PENINGKATAN PERALATAN PERKANTORAN

Secara umum Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemerintah dan Fungsi Pelayanan Masyarakat dalam arti yang luas. Oleh karena itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Fasilitas (sarana prasarana) dalam jumlah kapasitas yang memadai serta mendukung berbagai aturan perundangan yang berlaku merupakan syarat utama dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Pada Tahun Anggaran 2023 sampai pada tanggal 31 Desember 2023 persentase realisasi fisik telah mencapai 99,88%.

Pada tahun 2023 terdapat pekerjaan fisik bangunan berupa pekerjaan rehab pagar Kawasan Pelabuhan ,gedung perbaikan jaring, peninggian jalan dan Penerangan kompleks.

Pada tahun 2023 dilaksanakan pengadaan belanja modal berupa peralatan dan mesin, yang terdiri dari :

- Pengadaan Kamera CCTV *outdoor* sebanyak 5 Unit;
- Pengadaan Kursi sebanyak 15 Unit;
- Pengadaan Tripod Kamera sebanyak 1 Unit;
- Pengadaan *Sound system* sebanyak 1 Unit;
- Pengadaan Kendaraan Roda Tiga sebanyak 1 unit;
- Pengadaan laptop sebanyak 5 Unit;
- Pengadaan Tablet sebanyak 8 Unit.

BAB III
CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
PPN PEMANGKAT

IK. 1. PENERIMAAN PNBP DI PPN PEMANGKAT (RP. JUTA)

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, baik penerimaan fungsional maupun penerimaan umum. Perhitungan indikator ini yaitu nilai akumulasi Penerimaan atas jasa-jasa bulan berjalan. Berikut Capaian Indikator Kinerja Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian IK Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat Triwulan III

SS-1			Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pemangkat						
IKU-1			Penerimaan PNBP di PPN Pemangkat (Rp. Juta)						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
510,3	531,8	953,9	1.000	1.133,457	113	530	214	1.000	113

Sampai dengan akhir tahun 2023 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- berhasil dicapai dengan realisasi sebesar Rp. 1.133.457.681,- dengan persentase sebesar 113 %. Penerimaan terbesar berasal dari jasa tambat dan labuh yakni sebesar Rp. 550.230.031, penerimaan tambat dan labuh pada tahun 2023 berkurang 3,6% dari penerimaan tambat dan labuh tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan penerimaan PNBP khususnya Penerimaan Non SDA terjadi peningkatan baik itu dari sisi target maupun realisasinya.

Beberapa hal yang membuat keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah :

1. Adanya perbaikan dari SOP dan Standard Pelayanan yang dilakukan di PPN Pemangkat;
2. Adanya peningkatan dalam penertiban pada pintu pas masuk sehingga meningkat pula pendapatan PNBP dari Pas Masuk Harian;
3. Adanya inovasi pelayanan yang selama ini belum optimal pelaksanaannya yaitu Pelayanan Pengadaan Air Bersih SWRO melalui Pipa Distribus ke kios-kios; dan
4. Adanya peningkatan kepercayaan pengguna jasa dikarenakan dalam pemungutan jasa kepelabuhanan telah menggunakan aplikasi JALAPUKAT (Jasa Pelayanan Pelabuhan Pemangkat) dan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala berkelanjutan untuk pelayanan di PPN Pemangkat.



Gambar Rekapitulasi Data PNBP Non SDA PPN Pemangkat Tahun 2023

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini disebabkan oleh bertambahnya SDM dari penambahan ASN (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berdampak pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik. Dari sisi anggaran, untuk mendukung IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp.237.378.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.235.390.600,00 atau persentase realisasi sebesar 99,16%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan tercapainya peningkatan IKU ini diantaranya adalah :

1. Penggunaan aplikasi JALA PUKAT untuk pemungutan jasa kepelabuhanan (Pengadaan Air Bersih, Sewa Alat Berat, Listrik, Pas Masuk), dengan aplikasi tersebut data jasa kepelabuhanan dapat terekonsiliasi dengan baik;
2. Penggunaan aplikasi SIJAKA untuk penarikan jasa Tambat Labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Kegiatan Perjalanan Dinas ke PPS Cilacap guna melakukan Study tiru terkait pelayanan publik; dan
4. Penertiban Pas Masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat.

IK. 2. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON)

Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan kapal penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dengan pengukuran jumlah volume produksi perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan di PPN Pemangkat.

Tabel 2. Capaian IK Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

SS-2			Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat Meningkat						
IKU-2			Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat (Ton)						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
9.023	9.043	8.764	8.750	13.228	151	8.800	150	8.850	149

Capaian pada Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap ini mencapai sampai dengan akhir tahun 2023 di target 8.750 dan tercapai realisasi sebesar 13.228 atau persentase capaian sebesar 151%. Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja pada IKU ini adalah pencatatan pendataan produksi yang membaik dikarenakan setiap kapal yang masuk lewat *port tu port* tercatat dengan baik dan dipastikan setiap kapal masuk yang bongkar telah terdata dalam sistem pencatatan.

Dalam mendukung pencapaian target volume produksi, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Terdapat tambahan petugas data yang mengakibatkan pendataan produksi membaik meskipun demikian masih terkendala yakni kurangnya tenaga untuk pelaksanaan uji mutu ikan.

Dari segi anggaran, untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat pagu anggaran sebesar Rp.761.609.000,00 dan sampai dengan akhir periode 2023 telah terealisasi sebesar Rp.753.955.600,00 atau dengan persentase sebesar 99%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian adalah adanya :

1. Penggunaan aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
2. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan;
3. Penggunaan aplikasi PIPP; dan
4. Pelatihan terhadap petugas data dan studi tiru tentang pendataan produksi di PPS Nizam Zachman, Jakarta.

IK. 3. TINGKAT KINERJA PPN PEMANGKAT (NILAI)

Indikator kinerja PPN Pemangkat merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

- Administrasi dan sistem informasi;
- Fasilitas pelabuhan perikanan;
- Pelayanan umum; dan
- Investasi dan industri.

Pengukuran terhadap capaian indikator Tingkat Kinerja adalah berdasarkan hasil rata-rata nilai evaluasi pada aplikasi PIPP selama 1 tahun 2023 dengan kriteria sebagai berikut :

1. Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)
2. E-logbook
3. Aplikasi SPB-online
4. SHTI
5. Realisasi Penyerapan Anggaran
6. Pendapatan Pelabuhan
7. Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan
8. Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan
9. Panjang Dermaga
10. Kedalaman Kolam
11. Sarana Perbaikan (docking, bengkel)
12. Kelengkapan Fasilitas Pemasaran dan Distribusi Ikan
3. Ketersediaan Lahan Pelabuhan
14. Pelayanan Tambat Labuh
15. Produksi Perikanan

16. Frekuensi Kunjungan Kapal
17. STBLK
18. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
19. Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, Perkarantinaan Ikan, Publikasi
20. Pelaksanaan K5
21. Penyaluran Air Bersih (kapal dan industry pengolahan)
22. Penyaluran Es (Kapal)
23. Penyaluran BBM (kapal)
24. Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP
25. Pemanfaatan Lahan Pelabuhan
26. Penyerapan tenaga Kerja
27. Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan

Berikut adalah capaian indikator kinerja PPN Pemangkat
Tabel 4. Capaian IK Kinerja PPN Pemangkat

SS-3			Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing						
IKU-4			Tingkat Kinerja PPN Pemangkat						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
75,88	84,75	86,16	83	88	106,54	83	107	84	105

Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa realisasi capaian IKU Tingkat Kinerja adalah 88 atau persentase capaian sebesar 106,54% dari target yang telah ditentukan. Indikator ini dapat tercapai karena adanya kegiatan pendataan, penginputan dan pembaharuan data yang cepat dan terintegrasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini adalah dengan bertambahnya SDM (PPPK dan petugas data) sehingga dapat terbantu dalam hal penginputan kegiatan operasional pelabuhan pada aplikasi PIPP. Dari segi anggaran, terdapat pagu anggaran sebesar Rp.1.694.030.000,00 untuk operasional kegiatan mendukung IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan. Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar RP.1.686.246.800,00 atau persentase realisasinya sebesar 99,54%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah :

1. Peningkatan kompetensi petugas operator aplikasi PIPP melalui Bimtek;
2. Aplikasi DAPOOR untuk penyediaan data Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
3. Penggunaan aplikasi PEDATI untuk pendataan hasil pembongkaran ikan;
4. Peng-entry-an data hasil produksi perikanan yang secara kontinyu pada aplikasi PIPP; dan
5. Melakukan studi tiru tentang pendataan produksi di PPS Nizam Zachman, Jakarta.

IK. 4. TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN

Indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan, jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan yang diterbitkan. Adapun pembobotannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%);
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%);
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%).

Tabel 5. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan

SS-3			Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing						
IKU-5			Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)						
Realisasi			2023			Rentra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	-	80	100,00	125,00	0	0	0	0

Capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan sampai dengan akhir 2023 adalah 100%, dari target yang telah ditentukan sebesar 80%. Persentase capaian adalah 125%. Indikator tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan ini merupakan IKU baru sesuai dengan perubahan kedua perjanjian kinerja. Oleh karena itu tidak ada data pembandingan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maupun target untuk jangka menengah.

Ketercapaian IKU tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan tidak lepas dari peran dan penambahan SDM pada tim kerja Kesyahbandaran. Penambahan SDM dalam hal ini merupakan hasil rotasi pegawai antar tim kerja (1 orang di rotasi ke Tim Kerja Kesyahbandaran) dan penambahan PPPK. Dalam mendukung pencapaian IKU ini, didukung dengan anggaran dan sumber daya manusia. Penambahan SDM jabatan AP3T Pemula dan hasil rotasi pegawai menjadi mendorong percepatan pencapaian IKU ini. Dari segi anggaran, pagu anggaran yang disiapkan untuk menunjang kegiatan ini adalah Rp.376.897.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.376.128.100,00, atau dengan persentase capaian sebesar 99,8%. Adapun rician kegiatan pendukungnya antara lain;

1. Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan tata kelola dan operasional SPDN di pelabuhan perikanan ;dan
4. Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini meliputi :

1. Penggunaan aplikasi Teman SPB dalam pelayanan kesyahbandaran;
2. Petugas secara rutin melakukan rekonsiliasi data SPB, STBLK dan SHTI; dan
3. Petugas melakukan pelayanan dengan baik pada pengguna jasa.

IK. 5. NILAI PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN (PERSEN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formula UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menyelenggarakan kegiatan pengendalian lingkungan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Indikator Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang baru ada pada perjanjian kerja kedua. Capaian indikator tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Capaian IK Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)

SS-4			Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pemangkat yang Optimal						
IKU-7			Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	-	30,01	83,71	278,94	0	0	0	0

Pada tahun 2023 PPN Pemangkat memiliki target IKU Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan sebesar 30,01 dengan nilai capaian IKU sebesar 83,71 (278,94 %) dengan predikat sangat baik. Keberhasilan PPN Pemangkat dalam IKU ini karena terpenuhinya dokumen yang diperlukan dalam standar penilaian pada Aplikasi Selaraskan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU Pengendalian Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan ini disebabkan karena keterlibatan seluruh SDM dari setiap Tim Kerja dalam pemenuhan dokumen penilaian Selaraskan. Pelaksanaan IKU ini tidak terdapat pagu anggarannya dikarenakan adanya IKU ini pada triwulan keempat 2023.

IK. 6. KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN

Indikator kinerja ini menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur, pada perjanjian kinerja awal dan perubahan pertama penamaannya adalah Dokumen Kapal Perikanan yang Diterbitkan.

Perubahan penamaan atau nomenklatur juga diikuti oleh perubahan pola perhitungannya. Sebelumnya yang menjadi satuan perhitungan adalah berupa dokumen sertifikat yang diterbitkan, sementara untuk perubahan kedua satuannya berganti menjadi kapal. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. IK Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

SS-5			Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pemangkat						
IKU-8			Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	248	50	450	900,00	35	1.286	35	1.286

Sampai dengan akhir 2023, jumlah kapal yang telah diterbitkan dokumen kapal perikananannya adalah sebanyak 450 kapal. Jumlah ini merupakan jumlah kapal yang tidak berulang. Persentasenya capaian mencapai 900% dari target 50 kapal.

Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan patuhnya kapal perikanan dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) sebelum masa berlakunya berakhir. Disamping itu, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023, sangat membantu pemilik kapal karena pemilik kapal dapat mengajukan pembaruan SKKP tanpa proses pemeriksaan kelaikan dan masa berlaku SKKP tersebut lebih panjang dari sebelumnya hingga sampai dengan 31 Desember 2024. Dalam mendukung pencapaian IKU dokumen kapal perikanan yang diterbitkan didukung dengan tim SKKP yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang koordinator dan 5 orang verifikator. Kesemuanya masuk kedalam surat tugas kepala Pelabuhan Nomor B.2152/PPN.PMK/KP.440/VIII/2023. Guna mendukung kegiatan pada IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 246.248.800,00 atau dengan persentase sebesar 99,8%. Pencapaian target kinerja IKU ini didukung oleh beberapa kondisi yang mendukung pencapaian, yaitu :

- Tersedianya petugas yang memiliki brevet kelaikan kapal perikanan;
 - Surat edaran dari menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Dalam Masa Transisi; dan
 - Tingkat kepatuhan pengguna jasa di wilayah Kalimantan Barat yang tinggi.
- Terdapat 2 kegiatan yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian IKU yakni Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Gerai Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

IK. 7. PERSENTASE PENINGKATAN PENGETAHUAN KOMPETENSI DAN PERLINDUNGAN NELAYAN/AWAK KAPAL PERIKANAN

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang bersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

Adapun formula perhitungannya adalah persentase jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL dan telah tersertifikasi dibandingkan dengan seluruh jumlah awak kapal yang memiliki PKL atau e-PKL. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru terbit di triwulan keempat 2023, dan berikut adalah capaiannya.

Tabel 7. IK Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

SS-6			Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pemangkat						
IKU-9			Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	-	10	17,78	177,80	0	0	0	0

Capaian indikator Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan adalah 17,78, atau dengan persentase sebesar 177,8% dari target 10% yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan perubahan kedua perjanjian kinerja.

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL. Faktor penentu keberhasilan capaian yaitu kesadaran nelayan sebagai pelaku utama dan pemilik kapal sebagai pelaku usaha, ketersediaan petugas kesyahbandaran sebagai fasilitator Perjanjian Kerja Laut (PKL).

Petugas telah melaksanakan PKL dengan beberapa nelayan yang difasilitasi oleh PPN Pemangkat. Keberhasilan Sosialisasi terkait perlindungan awak kapal perikanan oleh Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Pemangkat dan antusiasme nelayan dan kesadaran terkait risiko kerja di kapal perikanan menyebabkan banyaknya nelayan mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan. Juga andil pemilik kapal mengajak diskusi seluruh ABK kapalnya agar mau menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang kemudian disahkan oleh Syahbandar di PPN Pemangkat. Sehingga persentase Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan mencapai target. Koordinasi dengan Tim Pokja Direktorat KAPI, terkait dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL serta percepatan Proses penerbitan PKL bagi awak kapal yang beraktivitas di PPN Pemangkat. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ini adalah sebesar RP. 13.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.12.428.000,00 atau dengan persentase sebesar 94,15%, anggaran tersebut terealisasi dalam kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut bagi Awak Kapal Perikanan dan E-PKL (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah).

IK. 8. NILAI PM PEMBANGUNAN ZI PPN PEMANGKAT

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 8. IK Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat

SS-7			Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat						
IKU-10			Nilai PM Pembangunan ZI PPN Pemangkat						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
76,00	62,14	77,00	75,00	90,90	121,20	75,07	121	75,07	121

Berdasarkan Penilaian Mandiri Zona Integritas yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Mandiri ZI PPN Pemangkat, didapat realisasi nilai pada tahun 2023 adalah 90,90 dengan prosentase 121,2% dari target yang ditetapkan yakni 75. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian nilai PM Zona Integritas PPN Pemangkat mengalami tren kenaikan.

Realisasi Kinerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di PPN Pemangkat ini sejalan dengan isi renstra Tahun 2024 pada tujuan Pembangunan Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat salah satunya pelaksanaan dan penerapan ZI WBK. Penialain Mandiri ZI WBK mengalami kenaikan dengan prosentase sebesar 18,05% yang pada Tahun 2023 sebesar 90,9 meningkat dari sebelumnya tahun 2022 yaitu 77.

Target tahun 2023 dapat terlampaui dikarenakan perolehan nilai yang jauh melampaui target untuk beberapa kategori, yaitu:

1. Penataan Tata Laksana dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 3,33 > target 2,63, nilai reform sebesar 3,5 > target 2,63;
2. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 4,93 > target 3,75;
3. Penguatan Akuntabilitas dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 5 > target 3,75, nilai reform sebesar 5 > target 3,75;
4. Penguatan Pengawasan dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 6,49 > target 5,63, nilai reform sebesar 7 > target 5,63; dan
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai dokumen pengungkit sebesar 4,74 > target 3,75, nilai reform 4,46 > target 3,75.

Dalam pelaksanaan ZI WBK di PPN Pemangkat, terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU tersebut, antara lain:

1. Adanya rapat yang dilakukan secara berkala agar terkontrolnya progress pemenuhan data dukung;
2. Adanya pengerjaan dokumen data dukung yang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam LKE;
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

IK. 9.TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA PPN PEMANGKAT

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa (20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 9. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

SS-7			Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat						
IKU-14			Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Pemangkat						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	89,10	76,80	77,50	81,88	105,65	75,00	109	75,00	109

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2023 adalah sebesar 81,88%. Perolehan nilai ini didasarkan pada LKE Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kerja, maka persentase ketercapaiannya adalah sebesar 105,65%.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa telah melakukan identifikasi kegiatan Barang/Jasa pada akhir tahun 2022 sehingga pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat sesuai dan tepat sasaran. Indikator ini menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian kelengkapan dokumen yang diunggah pada aplikasi SIRUP dan kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PPN Pemangkat. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki kedudukan berarti dalam penerapan pembangunan nasional guna meningkatkan pelayanan publik serta mengembangkan perekonomian baik nasional maupun daerah. Seiring berkembangnya situasi kondisi perekonomian dunia maupun dalam negeri yang tidak menentu, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan dan penerapan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan perencanaan pada tahun 2023 direviu oleh UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal sehingga proses tender memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan adanya reviu perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga dokumen tender menjadi valid. Proses pengadaan barang sudah dilakukan dengan menyesuaikan jenis dan spesifikasinya yang memenuhi komponen TDKN melalui e-purchasing sehingga dapat diproses sesuai peraturan yang berlaku. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan koordinasi terkait reviu perencanaan ke UK PBJ KKP dan Inspektorat Jenderal. Dalam mendukung ketercapaian IKU ini, SDM yang terlibat adalah 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen. Keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ dan PPK sehingga pelaksanaan keduanya ditugaskan pada pegawai dengan jabatan fungsional P3T dan AP3T yang telah memiliki sertifikat tersebut. Dalam hal anggaran, IKU ini diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 12.122.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN). Sampai dengan akhir 2023, telah terealisasi sebesar Rp. 12.066.600,00 atau dengan persentase serapan sebesar 99,54%.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Pelabuhan yang dilakukan lewat aplikasi SIRUP. Serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PPN Pemangkat pada tahun 2032. Monitoring kegiatan pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2023 sehingga dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Upaya yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, mengelola kontrak penyedia barang/jasa pemerintah, dan melakukan proses barang/jasa pemerintah secara e-purchasing. Penginputan realisasi pengadaan barang jasa secara detail di aplikasi SIRUP dan LPSE guna melakukan monitoring dan evaluasi capaian. Serta Monitoring kegiatan pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2023 sehingga dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

IK. 10. TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN PPN PEMANGKAT

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%) ;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tabel 10. Capaian IK Tingkat Kepatuhan BMN

SS-7			Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat						
IKU-15			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pemangkat						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	96,30	99,60	77,50	93,75	120,97	75,00	125	75,00	125

Berdasarkan LKE Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN, persentase yang diperoleh adalah 93,75. Persentase capaiannya adalah 120,97% dari target yang telah ditentukan sebesar 77,5.

Pelaksanaan IKU ini didukung oleh sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Pagu anggaran yang disiapkan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp.27.000.000,00, diperuntukan dalam kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dan Barang Milik Negara (BMN). Sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.26.511.000,00, atau dengan persentase serapan sebesar 98,19%. Sumber daya manusia yang mendukung penuh IKU ini adalah 2 (dua) orang pengelola BMN dan dibantu oleh pegawai yang menangani sarana dan prasarana. Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini adalah Pelaporan Keuangan dan BMN. Inventarisasi BMN serta kegiatan lain berupa pemeliharaan, peningkatan nilai dari asset yang dilakukan oleh PPN Kwandang. Melaksanakan penghapusan BMN setelah menerima Surat persetujuan penghapusan BMN, melakukan revisi RK BMN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

IK. 11. NILAI SKM LINGKUP PPN PEMANGKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Tabel 11 Capaian IK Nilai SKM

SS-7			Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pemangkat						
IKU-18			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat						
Realisasi			2023			Resntra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
-	-	85,22	88,21	90,68	102,80	-	-	-	-

Capaian SKM pada tahun 2023 adalah sebesar 90,68. Target yang telah ditentukan sebesar 88,21. Sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 102,8%. Kegiatan SKM telah dilaksanakan setiap triwulan. Akan tetapi menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan nilai SKM sebesar 6%.

Nilai ini diperoleh atas upaya PPN Pemangkat dengan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas, kompetensi SDM serta mendorong kepada setiap petugas layanan untuk selalu melakukan pengisian SKM pada setiap selesai melakukan pelayanan. Selain itu, petugas pelayanan juga wajib memberikan pendampingan kepada pengguna jasa pada saat melakukan pengisian SKM sehingga tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menjawab pertanyaan pada form SKM. Guna mendukung kegiatan didukung oleh 17 petugas pelayanan dan dibentuk SK Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SKM 2023. Disamping itu juga adanya penambahan SDM (PNS dan PPPK) sehingga beberapa pelayanan yang dahulu hanya ditangani 1 orang, saat ini dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan berakibat pada peningkatan pelayanan yang menjadi lebih baik.

Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator ini antara lain; (1) Melakukan peningkatan fasilitas, (2) Membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SKM dan (3) Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan SKM kepada petugas dan pengguna jasa.

Gambar Infografis Nilai SKM PPN Pemangkat Tahun 2023



**BAB IV
KEGIATAN
KESYAHBANDARAN
OPERASIONAL &
PENGUSAHAAN**

A. KEGIATAN KESYAHBANDARAN

Dalam rangka mewujudkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terus berupaya meningkatkan kapasitasnya baik dari segi fasilitas yang dimiliki maupun ragam pelayanan yang disediakan. Sejak beroperasi dari tahun 1982, sampai dengan saat ini telah banyak mengalami kemajuan baik dari segi fasilitas, maupun kinerja dalam memberikan pelayanan jasa.

Kegiatan Kesyahbandaran, operasional dan Tata kelola pelayanan usaha dilaksanakan sesuai dengan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan yang melekat pada Pelabuhan Perikanan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 sebagai berikut.

1. PENGAWASAN KAPAL

Kegiatan kesyahbandaran dalam kaitannya dengan pengawasan kapal yang beraktivitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah pendataan dan monitoring. Jumlah armada kapal perikanan secara umum didominasi oleh kapal > 5 GT yang menggunakan penggerak mesin dalam / inboard sebanyak 201 kapal, sebagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

JENIS ALAT TANGKAP / TYPE OF FISHING GEARS	UKURAN KAPAL / SIZE OF BOAT					Motor Tempel / Outboard Engine	JUMLAH / TOTAL
	> - 10 GT	11 - 20 GT	21 - 30 GT	31 - 50 GT	51 - 200 GT		
Pancing / Long Line							
Rawai Dasar	-	-	-	1	1	-	2
Pancing Ulur / Handlines	-	-	-	-	-	-	-
Jaring insang / Gillnets							
Jaring insang hanyut / Drift Gillnets	-	8	57	2	2	-	69
Jaring Tarik Berkantong	-	-	-	-	1	-	1
Jaring insang Hanyut Monofilament / Monofilament Drift Gillnet	-	-	-	-	-	-	-
Jala Jatuh Berkapal	-	-	-	1	8	-	9
Pukat Tarik / Seine net	-	-	-	-	-	-	-
Payang / Pelagic danish seine							
Kapal Lampu Bantu Puse Seine	-	3	1	-	-	-	4
Pukat Cincin/ Purse Seine	-	-	6	2	37	-	45
Pancing Cumi/Squid Jigging	1	23	22	-	-	-	46
Angkat	-	3	19	-	3	-	25
JUMLAH / TOTAL	1	37	105	6	52	0	201

Tabel Jumlah Armada Pengawasan Kapal Tahun 2023

2. SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB)

Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dilaksanakan di Gedung Pelayanan Terpadu dimana prosedur penerbitannya melibatkan instansi terkait, sehingga kapal perikanan akan mendapatkan SPB apabila kapal tersebut laik laut, laik tangkap dan laik simpan. Instansi terkait yang dimaksud adalah BPJS Ketenagakerjaan, Satwas SDKP Sambas, Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Pelaksanaan pelayanan penerbitan SPB dilakukan dengan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen kapal perikanan, pemeriksaan teknis, nautis, alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan, pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan.

Pelayanan SPB di PPN Pemangkat telah berbasis online melalui aplikasi E-PIT. Aplikasi e-PIT merupakan teknologi yang diinisiasi KKP untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi, serta kebijakan PIT bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan.

Jumlah pelayanan SPB sampai dengan akhir Desember tahun 2023 sebanyak 1.900 SPB.

- Pelayanan SPB bulan november lebih tinggi karena november puncak musim ikan dan cuaca mendukung untuk melaut.
- Pelayanan SPB lebih sedikit bulan april dikarenakan karena april bulan puasa menjelang lebaran, sehingga ABK kapal tidak melaut.

Tabel Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Periode Tahun 2023 secara rinci terlampir pada lampiran 5.

3. LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN

Pelaksanaan pendataan Log Book Penangkapan Ikan merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Tujuan Log Book Perikanan adalah:

1. Log Book sebagai landing declaration dari nahkoda, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan.
2. Log Book perikanan mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, volume).
3. Log Book perikanan mencatat data izin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal (LxBxD; Power), pelabuhan pangkalan kapal tersebut.
4. Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI (fishing capacity, efficiency fishing, musim penangkapan kaitannya dengan open and close session, dan konservasi).

Hasil pelaksanaan pendataan Log Book penangkapan Ikan yang diperiksa oleh petugas Syahbandar perikanan pada saat kedatangan kapal sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah sebanyak 876 Log Book atau naik 9% bila dibandingkan dengan periode tahun 2022 yaitu sebanyak 798 Log Book.

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Perikanan Tangkap No. 11/PER- DJPT/2019 tentang kewajiban penggunaan e-logbook bagi kapal ukuran > 30 GT, maka mulai November 2019 beberapa kapal ukuran > 30 GT maupun kapal ukuran < 30 GT telah melakukan aktivasi e-logbook.

Jumlah pelayanan logbook penangkapan ikan sampai dengan akhir Desember tahun 2023 sebanyak 876 logbook.

- Pelayanan SPB bulan november lebih tinggi karena november puncak musim ikan.
- Pelayanan logbook lebih tinggi bulan Juli dikarenakan karena april bulan puasa menjelang lebaran, sehingga ABK kapal tidak melaut.

Tabel Pelayanan logbook penangkapan ikan Periode Tahun 2023 pada lampiran 6.

4. PELAYANAN PENERBITAN SKKP

Pelayanan penerbitan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) merupakan tindak lanjut dari amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

Penerbitan SKKP pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dilakukan oleh 8 orang petugas sejak bulan Januari 2023. Jumlah pelayanan perpanjangan SKKP periode tahun 2023 sebanyak 606 dokumen dan reguler sebanyak 26 dokumen.

- Perpanjangan paling banyak di bulan oktober karena : adanya surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) tentang mekanisme pembaruan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP).
- Bulan agustus, november dan desember tidak ada perpanjangan dikarenakan telah habis masa berlaku Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang mekanisme pembaruan sehingga kapal - kapal yang akan melakukan perpanjangan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dilakukan melalui mekanisme reguler
- Penerbitan hanya ada agustus, september, november dan desember karena telah habis masa berlaku Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang mekanisme pembaruan sehingga kapal - kapal yang akan melakukan perpanjangan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dilakukan melalui mekanisme reguler.

Tabel Pelayanan penerbitan Sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) Periode Tahun 2023 pada lampiran 7.

5. PENERBITAN SHTI - LA

Pelaksanaan pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal (SHTI-LA) berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. Dalam Peraturan Menteri di atas disebutkan bahwa SHTI dapat diterbitkan oleh Competent Outhority apabila ada permohonan untuk produk ikan yang akan di ekspor ke Uni-Eropa. Sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023 terdapat penerbitan SHTI LA sebanyak 542 sertifikat. Tabel Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal (SHTI-LA) Periode Tahun 2023 terlampir pada lampiran 8.

6. KUNJUNGAN KAPAL

Kegiatan kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah dalam rangka pembongkaran hasil tangkapan, pengurusan SIB, logbook, muat perbekalan melaut (es, BBM, air tawar dan kebutuhan pokok) dan Cek Fisik Kapal. Kegiatan kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat selama tahun 2023 sebanyak 1.915 kali.

- Kunjungan kapal terbanyak pada bulan juli sebanyak 230 kali, hal ini dikarenakan
- Kunjungan kapal paling sedikit pada bulan januari yaitu 59 kapal, hal ini dikarenakan

Kunjungan Kapal Periode 2023 di PPN Pemangkat dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 11.

6. ASURANSI NELAYAN & PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL)

Pelayanan SCPIB (Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik), SKPI (Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan), Asuransi Nelayan dan PKL (Perjanjian Kerja Laut) sebagai tindak lanjut pemberlakuan terbitnya peraturan-peraturan yang berlaku, implementasinya pada tahun 2023 di PPN Pemangkat.

PKL (PERJANJIAN KERJA LAUT)

Perjanjian Kerja Laut, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen PKL yang disahkan sejumlah 2.313 dokumen PKL.

- Dokumen PKL terbanyak pada bulan november 282 dokumen karena Surat persetujuan berlayar (SPB) lebih banyak yang keluar khusus untuk nakhoda dan kepala kamar mesin.
- Dokumen PKL paling sedikit pada bulan januari yaitu 77 dokumen dikarenakan awal tahun banyak kapal yang tidak melaut khususnya alat tangkap pursein. Hal ini disebabkan faktor cuaca dan menjelang perayaan imlek (pemilik kapal sebagian besar merayakan hari raya imlek).

Tabel Perjanjian Kerja Laut Periode Tahun 2023 terlampir pada lampiran 9.

ASURANSI NELAYAN

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan. Kepesertaan Asuransi Nelayan di PPN Pemangkat periode tahun 2023 sebanyak 4.501 peserta Asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Tabel Asuransi Nelayan Periode Tahun 2023 terlampir pada lampiran 10. Selama tahun 2023 jumlah ABK yang klaim asuransi jaminan kematian sebanyak 2 claim dan asuransi kecelakaan kerja sebanyak 13 klaim.

B. KEGIATAN OPERASIONAL

Pelayanan SCPIB (Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik), SKN (Sertifikat Kecakapan Nelayan) sebagai tindak lanjut pemberlakuan terbitnya peraturan peraturan yang berlaku, implementasinya pada tahun 2023 di PPN Pemangkat.

7. SCPIB DAN SKN

SCPIB (SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK)

CPIB (Cara Penanganan Ikan yang Baik) adalah pedoman atau tata cara penanganan ikan yang baik diatas kapal dengan menerapkan SOP penanganan ikan mulai dari ikan ditangkap, pencucian ikan, penanganan ikan diatas kapal oleh ABK, pembekuan ikan, dan penyimpanan/ pembekuan di dalam palkah. SCPIB yang telah diterbitkan berjumlah 81 sertifikat.

SERTIFIKASI KECAKAPAN NELAYAN (SKN)

Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) merupakan sertifikasi keterampilan bagi awak kapal perikanan untuk ABK pada kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT atau Nakhoda yang bekerja pada kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT s.d. 30 GT. Sepanjang tahun 2023 PPN Pemangkat telah melaksanakan 2 (dua) kali bimbingan teknis dan menerbitkan 64 sertifikat.



8. FREKUENSI KAPAL BONGKAR

Kegiatan kunjungan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah dalam rangka pembongkaran hasil tangkapan. Jumlah kapal bongkar pada periode tahun 2023 sebanyak 1.096 kapal.

- Kapal bongkar terbanyak pada bulan november sebanyak 151 kapal, karena banyaknya aktivitas kapal luar yang masuk di PPN Pemangkat dan melakukan bongkar.
- Kapal bongkar paling sedikit pada bulan april yaitu 52 kapal, hal ini karena bulan april menjelang puasa dan lebaran sehingga kapal banyak yang tertambat dan tidak melaut.

Kapal bongkar Periode tahun 2023 di PPN Pemangkat dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 12.

9. PRODUKSI PERIKANAN

Produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terdiri dari ikan yang di daratkan dari kapal-kapal yang bongkar di PPN Pemangkat maupun ikan yang berasal dari luar Pemangkat yang diangkut ke PPN Pemangkat dengan angkutan darat untuk dipasarkan ke konsumen di Pemangkat.

Produksi ikan dari kapal bongkar merupakan ikan hasil tangkapan kapal perikanan dengan alat tangkap pancing, jaring insang, pukot cincin, pancing cumi, dan pukot Tarik yang beroperasi di WPP 711. Produksi ikan yang didaratkan pada tahun 2023 sebesar 10.878,067 ton.

- Produksi ikan tertinggi pada bulan juni karena kapal pursein sudah mulai melaut.
- Produksi ikan terendah pada bulan april karena : sudah menjelang puasa dan lebaran sehingga banyak kapal yang tertambat dan tidak melaut, dan menyebabkan hasil ikan sedikit.

Kenaikan produksi ikan pada tahun 2023, dipengaruhi oleh naiknya volume produksi ikan dominan yang cukup signifikan seperti Tongkol abu abu dengan volume 2.536,73 ton di tahun 2023 dan tongkol banyar dengan volume 1.668,07 ton di tahun 2023.

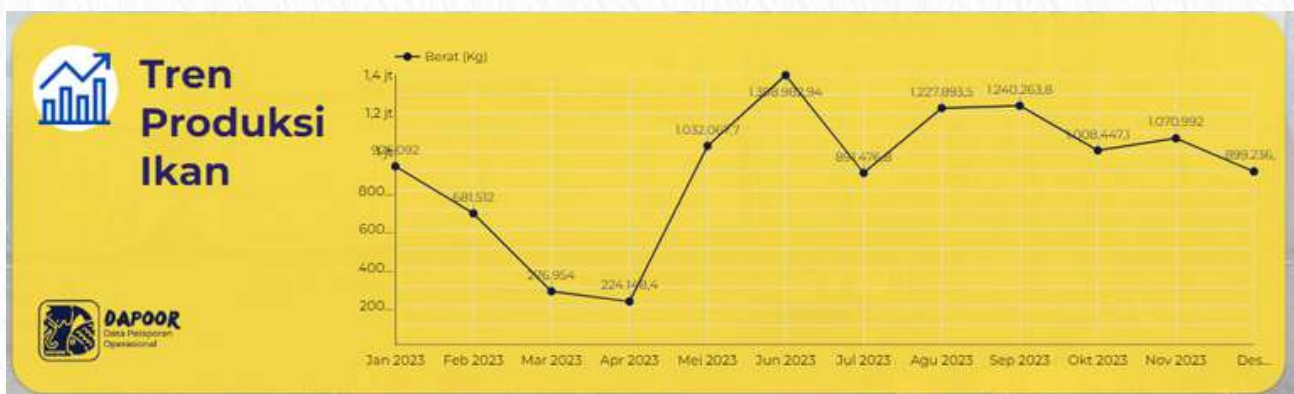


Sumber : Aplikasi TERJALA PPN Pemangkat

NILAI PRODUKSI

Nilai produksi ikan adalah nilai produksi perikanan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Nilai produksi yang didaratkan Tahun 2023 sebesar Rp. 168.771.529.349,-. Nilai produksi ikan per bulan 2023 di PPN Pemangkat ditunjukkan pada Grafik berikut ini.

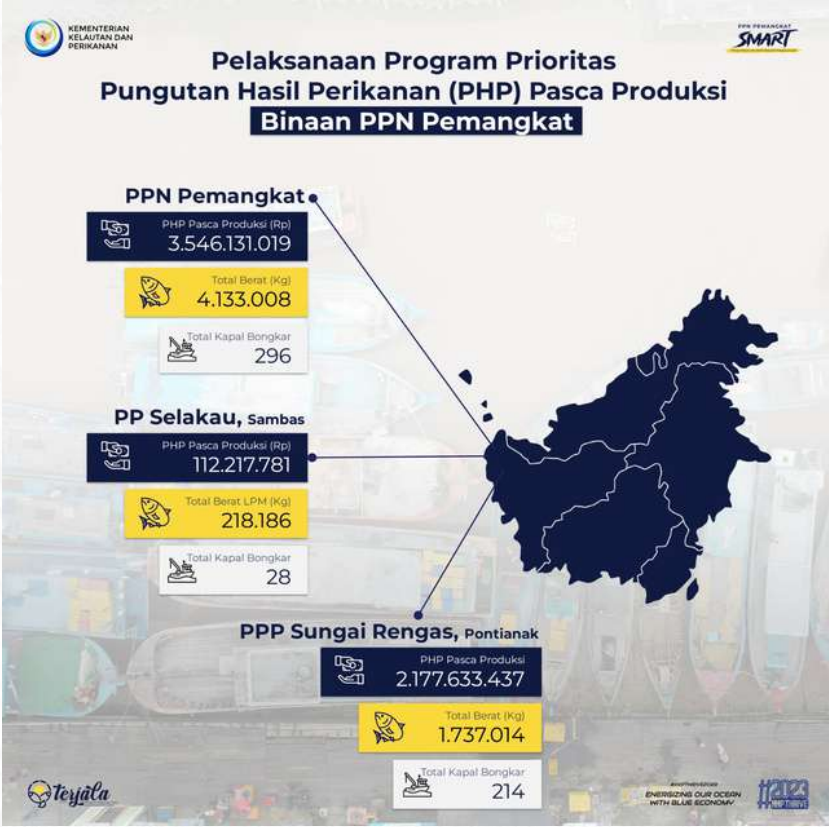
Total produksi yang didaratkan pada tahun 2023 sebesar 10.878,067 ton dengan harga rata-rata per Kg adalah sebesar Rp. 15.514,-. Hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan harga acuan yang diterbitkan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Sehingga berdampak terhadap peningkatan nilai produksi.



Sumber : Aplikasi TERJALA PPN Pemangkat

Seiring pelaksanaan operasional produksi perikanan, PPN Pemangkat juga memiliki pelabuhan perikanan binaan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pembinaan operasional guna mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Penunjukkan pelabuhan binaan ini sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No 55 Tahun 2022 Pelabuhan Perikanan Binaan Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PPN Pemangkat memiliki enam pelabuhan binaan, diantaranya yakni, PP Selakau, PP Kuala Singkawang, PP Sungai Duri, PP Kuala Mempawah, PPP Sungai Rengas, PP Sungai Jawi. Terkait rekapitulasi data operasional pelabuhan perikanan binaan PPN Pemangkat selama tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



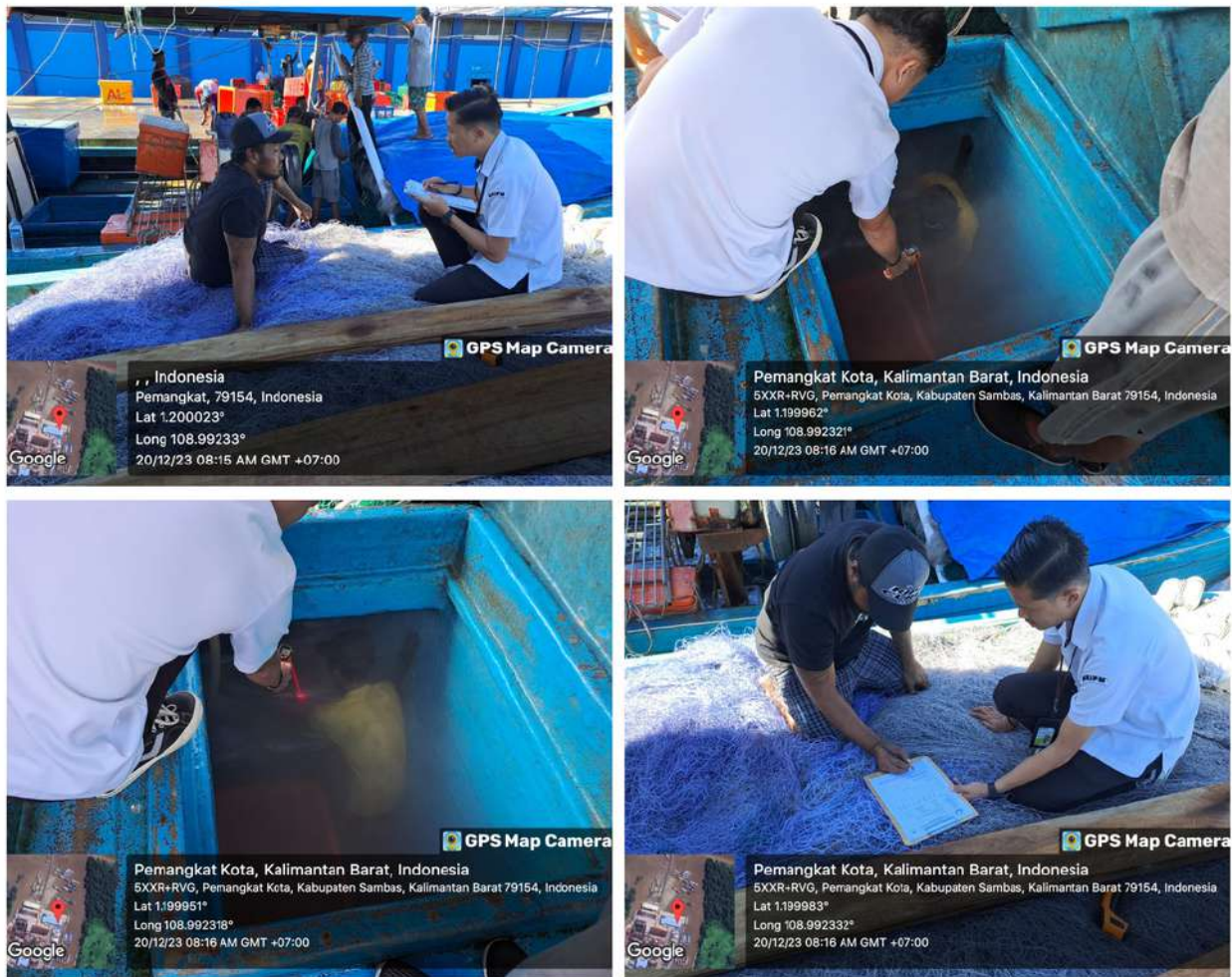
Sumber : Aplikasi TERJALA PPN Pemangkat

10. INSPEKSI PEMBONGKARAN IKAN

Kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan merupakan salah satu titik pengendalian mutu hasil perikanan tangkap (hulu), yang juga mendukung program industrialisasi perikanan tangkap. Inspeksi pembongkaran ikan bertujuan untuk menjamin dan memelihara konsistensi penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sehingga ikan yang didistribusikan ke konsumen dapat terjamin mutu dan keamanannya. Kegiatan inspeksi pembongkaran ikan meliputi :

1. Pendataan hasil tangkapan yang didaratkan;
2. Penilaian cara penanganan ikan selama pembongkaran (*Good Handling Practices*);
3. Pengecekan Sanitasi dan Higienis Kapal Perikanan;
4. Pengecekan Sanitasi Tempat Pembongkaran Ikan;
5. Pengukuran suhu ikan pada saat pembongkaran di pelabuhan perikanan;
6. Pengukuran suhu palkah dan *check* dokumen pencatatan suhu refrigerator kapal;
7. Uji mutu ikan yang didaratkan secara organoleptik;
8. Pengujian bahan Kimia Berbahaya (*formalin*).

Inspeksi pembongkaran ikan di PPN Pemangkat ini dilakukan secara *sampling* pada setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan pembongkaran ikan di wilayah pelabuhan, baik yang melakukan pembongkaran ikan di dermaga maupun di tangkahan melalui jalur darat atau laut. Total jumlah kapal yang dilakukan inspeksi pembongkaran di PPN Pemangkat sepanjang tahun 2023 sebanyak 914 unit kapal. Standar suhu ikan segar adalah < 4 derajat dan suhu beku ikan -16 derajat.



Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan selama kurun waktu tahun 2023 dilakukan sebanyak 914 unit kapal dari kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya, atau persentase kapal yang diinspeksi mencapai 100 %.

Adapun hasil temuan ketidaksesuaian yang harus diperhatikan antara lain ;

- Sebagian besar ABK dan pihak lain yang berada dalam keadaan merokok dan tidak menggunakan alas sepatu boot saat berada di kapal melakukan pembongkaran ikan.
- Masih terdapat kapal yang tidak melapisi bagian dock dengan bahan pelapis seperti karpet matras.
- Masih terdapat peralatan-peralatan yang berada di kapal dalam keadaan berkarat dan kotor.

Secara rinci data kapal yang diinspeksi tahun 2023 terlampir pada lampiran 13.

11. PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU

Berdasarkan tugas pokok Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang dilaksanakan di PPN Pemangkat meliputi :

1. Pengawasan Data Dasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI Higienis);
2. Pengawasan Sanitasi dan *Higiene* di TPI Higienis;
3. Pengawasan Sanitasi dan *Higiene* di Kapal Perikanan;
4. Inspeksi Pembongkaran Ikan.

Pengelolaan pelabuhan yang baik akan sangat menentukan besarnya nilai tambah dari hasil penangkapan yang merupakan inti dari kegiatan usaha yang ada di pelabuhan perikanan. Salah satu fungsi pelabuhan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah berfungsi sebagai pelayanan pembinaan mutu. Namun sebagian besar pelabuhan perikanan masih belum optimal melaksanakan fungsi tersebut, sehingga kedepan peran pelabuhan perikanan harus lebih ditingkatkan, tidak hanya menunjang fungsi pelabuhan perikanan, tetapi juga dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan persiapan dalam menyongsong persaingan global dan memenuhi persyaratan internasional, maka pelabuhan perikanan harus menerapkan kegiatan dan memenuhi kriteria antara lain; terpeliharanya pelabuhan perikanan melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pelabuhan perikanan dan memiliki sarana yang memadai dalam usaha pelaksanaan sistem jaminan mutu. Kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan, dilakukan dalam rangka mendukung penerapan model mall di pelabuhan perikanan.

Implementasi model mall di pelabuhan perikanan merupakan konsep yang diadopsi dari pasar modern / mall. Dengan diterapkannya model mall di pelabuhan perikanan diharapkan dapat mengubah stigma buruk pada pelabuhan perikanan sebagai tempat yang kotor, bau, rawan, dan persepsi negatif lainnya, sehingga dapat memperlancar semua kegiatan yang ada di pelabuhan perikanan terutama dalam kegiatan pelayanan dan bisnis.

Produk perikanan mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional. Dari segi nutrisi, ikan merupakan sumber protein hewani yang cukup besar bagi pemenuhan gizi masyarakat, dari segi sosial ekonomi sub sektor perikanan telah memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan devisa negara. Kontribusi tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam mendorong upaya peningkatan penanganan mutu di atas kapal perikanan. Armada kapal perikanan di Indonesia didominasi oleh kapal perikanan berukuran di bawah 30 GT (kurang lebih 90% - nya), dengan daerah penangkapan di perairan pantai sampai ke lepas pantai. Sebagian produksinya didaratkan di pelabuhan perikanan mengalami kerusakan fisik ikan dan penurunan mutu kurang lebih 30%. Hal ini dikarenakan penanganan saat di atas kapal belum memenuhi persyaratan teknis yang disarankan.

Keputusan Menteri Nomor : 01/MEN/2007 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi menjelaskan bahwa kapal penangkap dan pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan dan penanganan ikan di atas kapal harus memenuhi persyaratan ketentuan sanitasi dan *higiene* di kapal perikanan.

Implementasinya adalah Penerapan Sertifikasi Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SKP Kapal) untuk seluruh kapal-kapal perikanan serta Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan yang dilakukan oleh petugas pelabuhan perikanan untuk setiap kapal.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 264/DPT.0/PI.540.S4/I/09 Bab II Pasal 3, bahwa inspeksi pembongkaran ikan wajib dilakukan terhadap setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan yang melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan di pelabuhan. Inspeksi yang dimaksud, dilakukan terhadap pemeriksaan sanitasi dan *higiene* kapal, dokumentasi dan pengoperasian sarana penanganan, pendinginan, pembekuan dan penyimpanan ikan, kondisi tempat pembongkaran ikan, dan cara pembongkaran ikan di pelabuhan berdasarkan GHdP (*Good Handling Practices* / cara penanganan yang baik) serta pemeriksaan terhadap mutu ikan secara organoleptik.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat tahun 2023 meliputi :

PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Uji organoleptik yaitu cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu produk. Pengujian organoleptik ini mempunyai peranan sebagai pendeteksian awal dalam menilai mutu untuk mengetahui penyimpangan dan perubahan dalam produk. Pelaksanaan uji organoleptik dapat dilakukan dengan cepat dan langsung serta kadang-kadang penilaian ini dapat memberi hasil penilaian yang sangat teliti dalam beberapa hal.

Penilaian dengan indera bahkan melebihi ketelitian paling sensitif, tetapi oleh karena sifat pengujiannya yang subyektif maka diperlukan suatu standar dalam melakukan penilaian organoleptik.



Uji formalin adalah cara pengujian yang menggunakan suatu alat / bahan (test kit) untuk mengetahui kandungan zat kimia formalin didalam produk. Uji formalin ini sangat penting peranannya untuk mendeteksi kemungkinan pemakaian zat kimia berbahaya tersebut untuk mengawetkan ikan sejak di atas kapal Uji formalin adalah cara pengujian yang menggunakan suatu alat / bahan (test kit) untuk mengetahui kandungan zat kimia formalin didalam produk. Uji formalin ini sangat penting peranannya untuk mendeteksi kemungkinan pemakaian zat kimia berbahaya tersebut untuk mengawetkan ikan sejak di atas kapal sampai dengan pemasaran di lingkungan pelabuhan perikanan. untuk mengamankan ikan yang didaratkan dan produk-produk perikanan di PPN Pemangkat terhadap penggunaan formalin. Tindakan tersebut dituangkan dalam sebuah kegiatan pemeriksaan formalin terhadap jenis-jenis ikan yang didaratkan di PPN Pemangkat. Jumlah sampel yang diuji formalin selama tahun 2023 sebanyak 143 sampel dan hasil semuanya adalah negatif.

PEMBONGKARAN HASIL TANGKAPAN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan persyaratan/fasilitas pokok bagi pelabuhan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar ikan. Untuk menjaga kualitas ikan yang didaratkan haruslah dilakukan pembongkaran pada TPI yang bersih dan sehat. Pada tahun 2017 PPN Pemangkat membangun TPI Higienis guna meningkatkan pelayanan kepada pengusaha perikanan. TPI Higienis tersebut selesai dibangun pada Oktober 2017 dan sudah dioperasikan. Pengusaha/pemilik kapal yang memanfaatkan TPI Higienis merupakan kapal-kapal Gill Net dan kapal Angkut.

C. KEGIATAN PENGUSAHAAN

Kegiatan Pengusahaan di PPN Pemangkat telah terintegrasi melalui aplikasi **'Jalapukat'** (Jasa Layanan Usaha Pelabuhan Pemangkat). Melalui Aplikasi ini didalamnya mengintegrasikan data PNBP Non SDA yang terdiri dari layanan air bersih, alat/kendaraan, listrik, pas masuk, lahan/bangunan, serta layanan tambat labuh. Tarif yang dikenakan telah diatur sesuai dengan aturan PP No 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Non SDA PPN Pemangkat telah mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Mulai dari penerimaan di sektor lahan dan bangunan, Pas Masuk harian maupun langganan, Jasa Listrik dan Air. Kenaikan signifikan ini, tidak terlepas dari adanya perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan selama 2024. Data Kenaikan penerimaan PNBP Non SDA PPN Pemangkat dapat dilihat melalui gambar berikut.



Tampilan Jalapukat Data Rekapitulasi PNBP Non SDA Tahun 2023

12. PELAYANAN AIR BERSIH

Dalam menyediakan layanan Air Bersih. PPN Pemangkat memiliki fasilitas teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) yang dapat dipergunakan untuk penyediaan layanan kebutuhan air bersih bagi nelayan dan masyarakat umum. Pada tahun 2023, PPN Pemangkat terus melakukan perbaikan sarana layanan air bersih, hal ini dilakukan guna memberikan layanan yang prima dalam penyediaan kebutuhan air bersih baik bagi pengguna jasa maupun dengan masyarakat umum. Kualitas air yang dimiliki PPN Pemangkat ini juga secara konsisten dilakukan pengawasan keamanan kualitas air oleh PT. SUCOFINDO. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas layanan air bersih ini dengan terlebih dahulu mengaksesnya melalui website <https://www.terjalappnpemangkat.com/jala-pukat/air-swro>.



Gambar Fasilitas Air Bersih PPN Pemangkat



Jasa Pengadaan Air Bersih (SWRO)

Dengan Pengantaran Truck	
Harga per liter: Rp.55,-	Harga per 1 ton: Rp.55.000,-

Tanpa Pengantaran	
Harga per liter: Rp.40,-	Harga per 1 ton: Rp.40.000,-

Harga sesuai dengan ketentuan PP 05/2023

Minat Hubungi
Dini
0821-3063-5323
Kholik
0896-9230-1587



Gambar Pendistribusian Layanan Air Bersih PPN Pemangkat

13. PEMANFAATAN LAHAN DAN BANGUNAN

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas persewaan tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak. Hukum yang mengatur tentang penghasilan atas sewa tanah dan bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 pasal 2 menjelaskan bahwa penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan meliputi penghasilan atas pembayaran berkala selama perjanjian Bangunan Guna Serah, penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangunan Guna Serah berakhir.

PERSENTASE PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIANALISIS DAN/ATAU DIEVALUASI

No.	Nama Pengguna (Badan Usaha/Perorangan/Instansi)	Jenis Fasilitas Yang Digunakan *	Luas Fasilitas Yang Digunakan				Jenis Usaha	Jenis Penggunaan atau Pemanfaatan **)	Persetujuan Prinsip	
			Tanah (m2)	Addendum	Bangunan (m2)	Bgn Semi Permanen			Nomor	Tanggal
1	Sudomo Salim/Acen	Tanah & Bangunan	54,81	-	186	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
2	Mariyono	Tanah & Bangunan	157,1	-	221,1	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.667/DJPT.4/PL.210/II/2023	30 Jan 2023
3	M. Isa	Tanah	21,12	-	-	-	Pemasaran Ikan/Kantor	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
4	Risdianto	Tanah	15,04	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
5	Rafik2	Tanah	52,48	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
6	Supriadi	Tanah	15,04	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
7	Pairus1	Tanah	74	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
8	Hamiza	Tanah	9,02	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
9	Marwan	Tanah	15,04	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
10	Hamka1	Tanah	121,57	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
11	Yusman	Tanah	110	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
12	Rafik1	Tanah	106	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
13	Hamka3	Tanah	183,1	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.349/DJPT.4/PL.210/II/2022	08 Feb 2022
14	Pairus2	Tanah	175	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
15	Yoka Ifana Putra	Tanah	243,5	-	-	-	Pemasaran Ikan/Kantor	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
16	Supriyono	Tanah	7,92	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
17	Parina	Tanah & Bangunan	9,68	-	4,88	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
18	Joko	Tanah & Bangunan	8,4	-	9,3	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
19	M. Subri	Tanah & Bangunan	4,81	-	4,88	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
20	Ramlan Dulhadi	Tanah & Bangunan	8,1	-	9,3	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
21	Hamka2	Tanah	18	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.1185/DJPT.4/PL.210/II/2023	21 Feb 2023
22	Desi	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	18,55	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.6531/DJPT.4/PL.210/X/2023	17 Okt 2023
23	Majri	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	15,9	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.3365/DJPT.4/PL.210/V/2023	23 Mei 2023
24	Jumiati	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	18,55	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
25	KPRI	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	18,55	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.660/DJPT.4/PL.210/III/2022	23 Mar 2022
26	Deliphan1	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	15,9	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
27	Deliphan2	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	18,55	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
28	Hamidah1	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	18,55	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
29	Hamidah2	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	15,9	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
30	Marita	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	15,9	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.3365/DJPT.4/PL.210/V/2023	23 Mei 2023
31	Agustian1	Bangunan & Bgn Semi	-	-	18	18,55	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
32	Nurjanah	Tanah & Bangunan	42	-	27	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
33	Susan	Tanah & Bangunan	48	-	27	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
34	Linda Riana2	Bangunan	-	-	21	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.1962/DJPT.4/PL.210/XII/2022	7 Des 2022
35	Yoka Ifana Putra2	Bangunan	-	-	21	-	Pemasaran Ikan/kantor	Sewa	B.1962/DJPT.4/PL.210/XII/2022	7 Des 2022
36	Linda Riana	Bangunan	-	-	21	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
37	Ifan Willyanto	Bangunan	-	-	21	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.3367/DJPT.4/PL.210/V/2023	23 Mei 2023
38	Juniarti	Bangunan	-	-	21	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.3365/DJPT.4/PL.210/V/2023	23 Mei 2023
39	Nurdiansyah	Bangunan	-	-	21	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
40	Uray Rino	Bangunan	-	-	21	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
41	Agustian2	Bangunan	-	-	42	-	Kebutuhan Logistik Nelayan	Sewa	B.516/DJPT.4/XII/2021	24 Des 2021
42	Rafik3	Bangunan	-	-	21	-	Pemasaran Ikan/kantor	Sewa	B.660/DJPT.4/PL.210/III/2022	23 Mar 2022
43	Heriyanto	Tanah	99,9	-	-	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.4400/DJPT.4/PL.310/VII/2023	10 Juli 2023
44	Andy Irwan	Tanah	375,9	-	-	-	Pemasaran Ikan/Kantor	Sewa	B.4366/DJPT.4/PL.210/VII/2023	07 Juli 2023
45	Yudiansyah	Tanah & Bangunan	45,5	-	20	-	Pemasaran Ikan	Sewa	B.3367/DJPT.4/PL.210/V/2023	23 Mei 2023

Gambar Data Persentase Pengguna Jasa Lahan dan Bangunan PPN Pemangkat

Contoh penghasilan sewa atas tanah dan/atau bangunan mencakup tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. Pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan pph final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh Penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau Bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Total luas area pelabuhan yang ada saat ini adalah 36.500 m², dimana luas tanah industri itu sendiri 4.729 m², tanah industri yang digunakan 4.485 m² dengan sisa tanah industri yang belum digunakan 20.244 m².

Penggunaan tanah/lahan/fasilitas di PPN Pemangkat berjumlah 50 pengguna jasa, dimana diolah oleh pengguna jasa langsung berjumlah 21, sedangkan dibangun menggunakan anggaran APBN berjumlah 29 buah/fasilitas. Seluruh bidang tanah/lahan PPN Pemangkat sudah bersertifikat dan aset telah di PSP (penetapan status penggunaannya).

Total Nilai investasi yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah Rp. 2.699.600.000,00, dimana jenis usaha/investasi di PPN Pemangkat terdiri dari kios/warung makan atau minum dengan jumlah 23 buah, sedangkan kios ikan / gudang berjumlah 27 buah.

Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah penerimaan dari pelayanan penggunaan tanah adalah sebesar Rp. 58.026.397,- yang terdiri dari penerimaan Pemasaran Ikan Rp. 24.045.814,-, penerimaan Kebutuhan Logistik Nelayan Rp. 1.134.000,- dan penerimaan Pemasaran Ikan/Kantor Rp. 4,673,638,-.

Penerimaan tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 karena meningkatnya penggunaan tanah dan bangunan baik dari jumlah pengguna maupun luas tanah dan /atau bangunan yang digunakan. Selain itu ada juga penggunaan yang semula tanah menjadi penggunaan bangunan serta pemberlakuan tarif baru Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 19 September 2021 sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan penggunaan tanah dan/ atau bangunan.

14. PENYERAPAN TENAGA KERJA NELAYAN & NON NELAYAN

Penyerapan jumlah tenaga kerja nelayan pada tahun 2023 sebanyak 2.098 Orang dan non nelayan sebanyak 3.079 Orang. Untuk tenaga non nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat meliputi tenaga kerja yang beraktifitas dalam kawasan pelabuhan yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan, usaha perorangan dan KUD, bakul/pedagang ikan, buruh bongkar muat, pekerja jasa angkutan dan lainnya.

15. PELAYANAN PAS MASUK

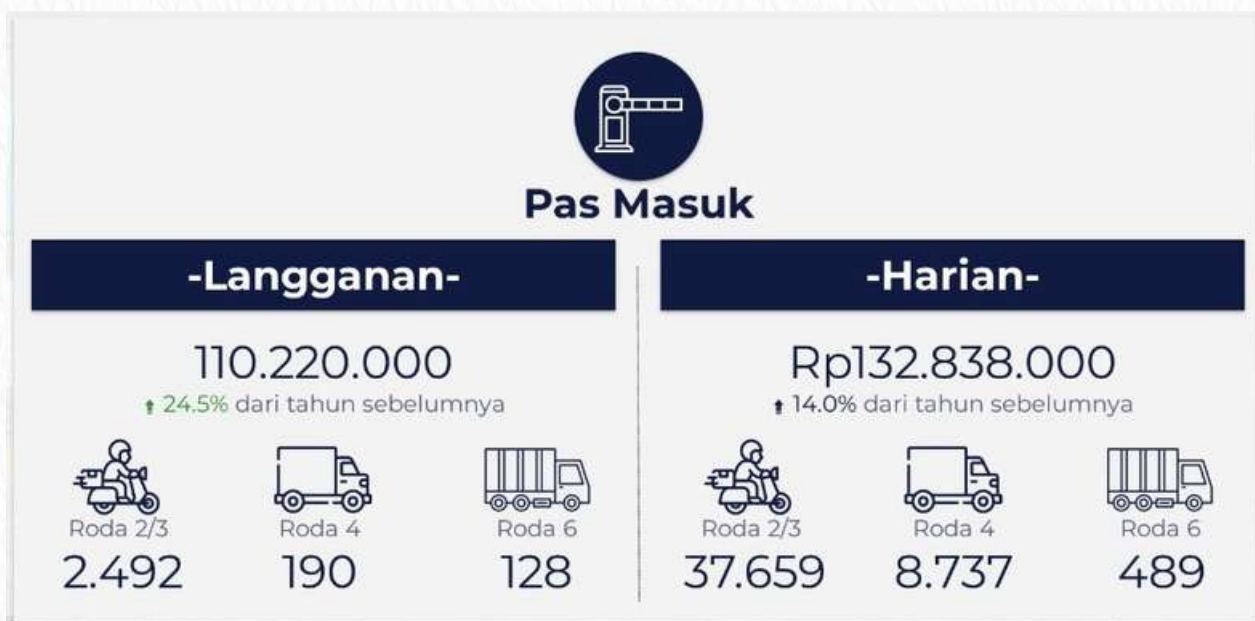
Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 2021 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di transportasi darat, diantaranya tarif jasa tanda masuk pelabuhan atau PAS masuk pelabuhan dikategorikan yaitu PAS masuk harian dan langganan. Pas masuk harian terdiri dari pengecer ikan baik itu menggunakan sepeda motor maupun roda empat atau roda enam serta orang-orang yang keluar masuk pelabuhan, sedangkan PAS masuk langganan merupakan orang-orang yang terdiri dari agen ikan, ABK kapal, pengurus kapal dan para sub agen ikan yang ada dalam kawasan pelabuhan itu sendiri.

Jasa masuk pelabuhan untuk kendaraan meliputi, tanda masuk pelabuhan bagi kendaraan per sekali masuk dengan rincian untuk kendaraan roda 2 Rp. 2.000,- roda 4 Rp. 6.000,00 dan tanda masuk roda 6 Rp. 10.000,00. Proses transaksi PAS masuk non tunai atau menggunakan kartu elektronik.



Aktivitas Pas Masuk PPN Pemangkat

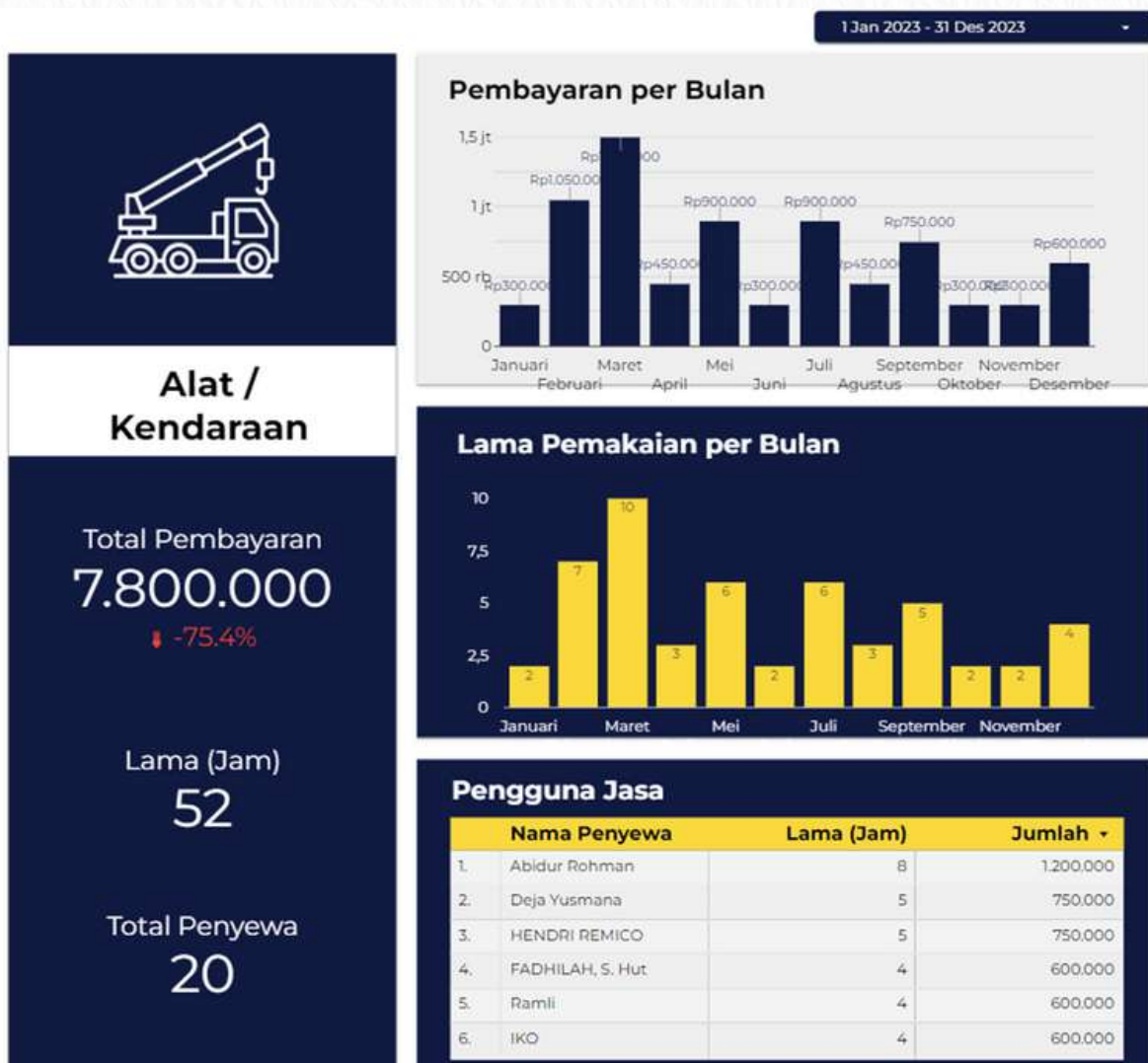
Pendapatan jasa pas masuk harian PPN Pemangkat selama periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2023 senilai Rp. 132.828.000, dimana total pendapatan ini meningkat sekitar 14 % dari tahun sebelumnya, sedangkan pengguna jasa pas masuk berlangganan senilai Rp. 110.220.000, dimana total pendapatan ini meningkat sekitar 24,5 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan dalam penertiban dan perubahan sistem pada jasa pas masuk sehingga meningkat pula pendapatan PNPB dari Pas Masuk Harian maupun langganan.



Sumber Data Aplikasi Jalapukat PPN Pemangkat Tahun 2023

Dalam rangka menunjang kelancaran bongkar muat barang komersial dan distribusi hasil perikanan ke sentra pengolahan dan pemasaran, tersedia sarana berupa crane (1 unit), dump truck (2 unit), dan forklif (1 unit). Frekuensi penggunaan crane periode tahun 2023 selama 52 jam dengan total penyewa 20 orang dan memperoleh penerimaan PNBP sebesar Rp. 7.800.000,-.

Disamping melayani kegiatan komersial, crane dan dump truck juga digunakan untuk keperluan internal pelabuhan, pengantaran pembelian air dan pelayanan sosial berupa bantuan kepada nelayan maupun masyarakat apabila ada yang mengalami musibah.



Rekapitulasi Pelayanan Sewa Alat/Kendaraan berdasarkan Tahun 2023

16. PELAKSANAAN SISTEM PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN (PIPP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Bab VI mengenai Sistem Informasi dan Data Statistik Perikanan, Pasal 46 ayat (1) : “Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan”. Ayat (2) menyatakan bahwa : Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi Perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi data statistik perikanan.

Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan merupakan sebuah pusat informasi tentang pelabuhan perikanan untuk pengembangan perikanan dan manajemen database berbasis pengelolaan sumberdaya ikan dan permintaan pasar dengan membangun suatu sistem komputerisasi pengelolaan database dan informasi tentang pelabuhan perikanan secara terpadu.

Perencanaan dan Pelaksanaan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan diselenggarakan untuk memenuhi fungsi-fungsi sebagai :

A. Dari sisi prasarana fisik :

- Perencanaan dan pengembangan pelabuhan perikanan
- Pengelolaan fungsional
- Manajemen pemeliharaan fisik

B. Dari sisi sosial ekonomi perikanan :

- Perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
- Perencanaan dan pengembangan pemasaran dan distribusi ikan

C. Dari sisi layanan informasi Perikanan :

- Memberikan informasi harian dan periodik tentang jenis & harga, produksi ikan; jumlah kapal perikanan dan nelayan serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan Operasional Pelabuhan Perikanan.

Dalam rangka memudahkan para nelayan dalam mendapatkan informasi kelautan, pusat informasi PPN Pemangkat telah memiliki alat publikasi informasi dari BMKG Maritim. Segala informasi mengenai PPN Pemangkat dapat diakses di situs : www.pipp.dkp.go.id dengan alamat e-mail: pemangkat_ppn@yahoo.com.

Dalam seksi operasional pengoperasian PIPP dilakukan oleh 2 orang operator dan sekaligus sebagai enumerator di lapangan. Pengoperasian PIPP sendiri terdiri dari input data harian, berita/ kegiatan yang berhubungan dengan operasional PPN Pemangkat.

Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya.

Proses validasi dilakukan setiap enam bulan sekali oleh validator pusat dengan mengundang utusan dari UPT terkait (PPN Pemangkat) ke kantor pusat/ provinsi. Data dipersiapkan antara lain : data hasil tangkapan harian kapal penangkap ikan baik dari input Produksi (PIPP) , Laporan Data Statistik Pelabuan Perikanan, Data – data perikanan tangkap dan pendaratan ikan lainnya yang relevan.

17. PENILAIAN EVALUASI KINERJA

Berdasarkan fungsi pelabuhan perikanan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan dan evaluasi kinerja pelabuhan perikanan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 432/DPT3/OT.220.D3/I/2008) yang menggunakan 11 parameter yaitu pengumpulan laporan, jumlah produksi ikan, penyerapan tenaga kerja, penyaluran air bersih, penyaluran es, penyaluran BBM, jumlah investor di Pelabuhan, pendapatan Pelabuhan Perikanan, realisasi pembangunan, pelaksanaan K3 (Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban).

Berdasarkan penilaian Direktorat pelabuhan perikanan terhadap evaluasi kinerja PPN Pemangkat tahun 2019 dalam kategori “Sangat Baik” dari 27 jenis kriteria yaitu frekuensi pengiriman data (PIPP), E-Logbook, aplikasi SPB online, SHTI, realisasi penyerapan anggaran, pendapatan pelabuhan, ketersediaan SDM pengelola pelabuhan perikanan, kapasitas daya tampung kolam pelabuhan, panjang dermaga, kedalaman kolam, sarana perbaikan (docking, bengkel), kelengkapan fasilitas pemasaran dan distribusi ikan, ketersediaan lahan pelabuhan, pelayanan tambat labuh, produksi perikanan, frekuensi kunjungan kapal, STBLKK, sosialisasi dan bimbingan teknis, fasilitas penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, pelaksanaan K5, penyaluran air bersih (kapal dan industry pengolahan), penyaluran es, penyaluran BBM, pelayanan pengolahan hasil perikanan di WKOPP, pemanfaatan lahan pelabuhan, penyerapan tenaga kerja, dan perubahan jumlah investor di pelabuhan perikanan. Evaluasi Kinerja PPN Pemangkat Tahun 2023 dilihat pada Tabel berikut.

SS-3			Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing						
IKU-4			Tingkat Kinerja PPN Pemangkat						
Realisasi			2023			Renstra 2020-2024			
2020	2021	2022	Target Tahunan	Realisasi	% Capaian thd Target Tahunan	Target 2023	%Capaian thd Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target 2024
75,88	84,75	86,16	83	88	106,54	83	107	84	105

Berdasarkan tabel di atas, didapat bahwa persentase tahunan Evaluasi Tingkat Kinerja PPN Pemangkat mencapai 106,54%. Hal ini tidak lepas dari upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan dan pelayanan kepada stakeholder serta mendorong kinerja enumerator dan operator untuk lebih aktif melakukan pencatatan dan entry data aktivitas di PPN Pemangkat sesuai aplikasi yang telah ada secara terus menerus sosialisasi maupun penyebaran informasi lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perikanan.

BAB V
INOVASI, CAPAIAN
KINERJA DAN
KEGIATAN TAHUN
2023

INOVASI

Dalam era modern ini, inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing suatu instansi. Instansi, baik pemerintah maupun swasta, harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dinamis di sekitarnya. Kemajuan teknologi dan perkembangan tren global menuntut setiap instansi untuk terus melakukan inovasi guna mengoptimalkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Inovasi tidak hanya terbatas pada pengembangan produk atau layanan, tetapi juga mencakup perubahan dalam proses kerja, manajemen sumber daya, dan pendekatan strategis. Dalam konteks instansi, inovasi menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan efektivitas, serta menghadirkan solusi kreatif dalam menanggapi perubahan lingkungan.

Keberhasilan suatu instansi dalam menerapkan inovasi dapat mengubah paradigma tradisional menjadi lebih progresif. Langkah-langkah inovatif dapat melibatkan pemanfaatan teknologi terkini, implementasi sistem informasi yang cerdas, pengembangan kebijakan yang responsif, dan pemberdayaan sumber daya manusia dengan keterampilan yang relevan. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep inovasi, instansi dapat menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan berkelanjutan, serta menghadirkan solusi yang berdaya saing di tengah dinamika perubahan zaman. Maka dari itu, diawal tahun 2023, PPN Pemangkat telah melakukan berbagai langkah inovasi, salah satunya dengan adanya aplikasi berbasis website yakni 'Terjala' atau Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data, yang merupakan Aplikasi berbasis web dan smartphone yang membantu dalam pelaksanaan tata kelola operasional, syahbandar dan pelayanan umum Pelabuhan perikanan khususnya PPN Pemangkat. Web apps PPN ini menjawab kebutuhan data yang akuntabel, efisien dan efektif dalam pelaksanaan tata kelola operasional, syahbandar dan pelayanan umum yang ada di PPN Pemangkat.

FILOSOFI TERJALA



Nama TERJALA berasal dari kata "jala" yang bisa diartikan sebagai "jaringan" atau "sistem yang terhubung". Nama ini dapat merujuk pada fungsi aplikasi untuk menghubungkan pengguna dengan informasi atau layanan yang mereka butuhkan, atau untuk menghubungkan pengguna dengan orang-orang dalam jaringan sosial mereka.



Filosofi dari nama "jala" dapat dihubungkan dengan konsep saling terhubung dan saling bergantung antara manusia dan alam, serta antara satu sama lain. Seperti jaring ikan yang dapat menangkap ikan-ikan yang saling berhubungan satu sama lain, aplikasi "terjala" dapat membantu pengguna terhubung dengan orang-orang dalam jaringan mereka, mengakses informasi yang relevan, dan memperluas kesempatan dan jaringan sosial mereka.

Untuk dapat mengakses ke halaman terjala masyarakat dapat mengaksesnya melalui <https://www.terjalappnpemangkat.com/home>

PENGHARGAAN

Dalam rentang waktu tahun 2023, PPN Pemangkat dengan bangga mencapai berbagai pencapaian. Melalui dedikasi, inovasi, dan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan, PPN Pemangkat menjadi salah satu UPT unggul, dibawah Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pencapaian ini tidak terlepas dari visi dan misi PPN Pemangkat yang mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan pelayanan yang prima. Melalui berbagai program strategis, PPN Pemangkat berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, baik dalam pelayanan operasional, kesyahbandaran, maupun layanan kepada pengguna jasa kepelabuhan.

Beberapa capaian penghargaan yang diraih PPN Pemangkat sepanjang tahun 2023, diantaranya yakni ;



Penghargaan Peringkat II Penerapan Log Book Kategori UPT Pusat

PPN Pemangkat mendapat penghargaan peringkat II Kategori UPT Pusat dalam Penerapan Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2022. Penyerahan penghargaan ini dilakukan di Yogyakarta, 5 April 2023.



Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelabuhan

PPN Pemangkat mendapatkan penghargaan untuk hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan periode Triwulan III dengan kategori sangat baik. Penghargaan ini di berikan oleh Direktur Kepelabuhan Perikanan di Jakarta, 6 Oktober 2023.



Penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif

PPN Pemangkat meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dengan predikat informatif pada acara apresiasi kehumasan tahun 2023 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada tanggal 22 Oktober 2023, di Jakarta, dan diberikan oleh Sesditjen Perikanan Tangkap, Trian Yunanda.



Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

PPN Pemangkat mendapatkan penghargaan peringkat I Tingkat DJPT dan Peringkat 8 Tingkat KKP terkait Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023.

ASKI KKP VERIFIKASI TAHUN 2023 (1)							
8							
NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
21	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	47,54	46,44	93,98	AA (SANGAT MEMUASKAN)	8	1
22	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	42,95	47,83	90,79	AA (SANGAT MEMUASKAN)	17	4

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2023



Kunjungan Kerja Dari Ombudsman Republik Indonesia

Dokumentasi terkait Kunjungan kerja dari Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka pengawasan pelayanan publik terhadap penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota dan zona di PPN Pemangkat dan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas, tanggal 23 dan 24 Agustus 2023. Kunjungan kerja ini didampingi oleh Kepala PPN Pemangkat, Anam Tofani, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas, Kasianus Kimin.



Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan

Dokumetasi Kepala Pelabuhan PPN Pemangkat, menghadiri peringatan “Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan” yang diselenggarakan oleh Stasiun PSDKP Pontianak, Selasa, 17 Oktober 2023..

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya pembagian ikan konsumsi kepada masyarakat Kalimantan Barat yang dilakukan bersamaan juga dengan kegiatan pemusnahan barang hasil pengawasan sumber daya perikanan berupa ikan invasif, pakan obat yang tidak terdaftar dan alat penangkapan ikan yang merusak.



Pertemuan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 711

PPN Pemangkat bersama Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan bekerjasama dengan The United States Agency for International Development (USAID) Ber-IKAN menyelenggarakan pertemuan lembaga pengelola perikanan WPPNRI 711 di Batam, Pada Senin 6 November 2023.

Tujuan dilakukannya pertemuan ini yakni untuk dapat memperkuat pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih terukur, maju dan berkelanjutan, guna mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur khususnya di WPPNRI 711 wilayah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Selain itu, pertemuan ini ditunjukkan sebagai bahan untuk mempersiapkan penyempurnaan struktur organisasi dan personil UPP-WPPNRI yang adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan perikanan masa depan, dengan penerapan prinsip keterwakilan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan azas kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan.



Sertifikasi ISO 14001:2015



Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang berwawasan Lingkungan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut serta mendukung kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang berwawasan Lingkungan dengan melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan.

Sistem Manajemen Lingkungan sebagaimana SNI ISO 14001:2015 yang merupakan best practice international, SML telah ditetapkan menjadi sasaran nasional yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Terlaksananaya Kegiatan ISO 14001:2015 oleh pihak eksternal QAI dengan diterbitkannya surat Catatan Hasil Review yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Kegiatan ISO 14001:2015 yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah sesuai dengan standar yang berlaku.



Bakti Nelayan PPN Pemangkat Dalam Rangka HUT KKP

Dokumentasi pembagian sebanyak 366 Kg ikan kepada masyarakat dan aparaturnya Desa Sebayan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Pada hari Rabu 22 November 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan sekaligus mengampanyekan 'Gemarikan' atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.



Konferensi Nasional Ke-11 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

Dokumentasi Konferensi Nasional Ke-11 Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil, yang diselenggarakan di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dari tanggal 27 s.d 29 November 2023. PPN Pemangkat, pada kesempatan ini mengisi Pameran KONAS Pesisir XI (Coastal Expo) yang berlokasi di Balai Enggang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Di Booth Pameran PPN Pemangkat, diisi oleh merchandise menarik dengan mengikuti kuis.



HUT ke-24 Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dharma Wanita Persatuan PPN Pemangkat menghadiri secara daring Peringatan HUT ke-24 Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlangsung di Ruang rapat PPN Pemangkat, Jumat 15 Desember 2023. Peringatan Ulang Tahun DWP KKP ini mengusung tema "Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan".



	2022	2023	2024	%
2. PENANFAAN TATAKALAKSIA	5,50	5,62	3,33	58,24%
3. PENANFAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	3,72	4,93	98,62%
4. PENCUATAN AKUNTABILITAS	5,00	3,72	5,00	100,00%
5. PENCUATAN PENGAWASAN	7,50	5,62	6,49	85,56%
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,72	4,74	94,73%
II. REFORMASI	39,00	22,50	26,46	68,21%
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,00	2,00	75,00%
2. PENANFAAN TATAKALAKSIA	3,50	2,62	3,50	100,00%
3. PENANFAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	6,00	4,72	5,00	70,00%
4. PENCUATAN AKUNTABILITAS	3,00	3,72	5,00	100,00%
5. PENCUATAN PENGAWASAN	7,50	5,62	7,00	93,33%
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,00	3,72	4,46	89,23%
TOTAL PEROVOKSI	45,00	33,72	33,75	75,00%
HASIL	49,00	30,00	37,11	75,73%
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN	22,50	16,58	21,14	93,97%
a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Skala Eksternal): Indeks Persepsi Aksi Korupsi/ IPAK	17,50	13,13	16,14	92,25%
b. Capaian Asesra Lintas Sektoral pada Capaian Kinerja Subsektor	5,00	3,45	5,00	100,00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	13,42	15,31	87,49%
a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Survei	17,50	13,42	15,31	87,49%
TOTAL HASIL	78,00	53,42	63,46	81,37%

Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi PPN Pemangkat

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat mengadakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi PPN Pemangkat yang diselenggarakan di Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat 1 Desember 2023. Dalam sambutannya, PPN Pemangkat, Anam Tofani, menyampaikan, Zona Integritas bukanlah hanya sekedar sebuah label, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menerapkan praktik-praktik terbaik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.



Sosialisasi Pembinaan Kepegawaian

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dalam hal ini bidang kelompok SDM Aparatur dan Organisasi, melakukan sosialisasi pembinaan kepegawaian yang diikuti oleh seluruh pegawai PPN Pemangkat, Kamis, 21 Desember 2023. Turut hadir Narasumber dalam kegiatan ini yakni Subkoordinator Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Sukmarumaeti. Dalam paparannya diantaranya menjelaskan terkait, Pengembangan kompetensi bagi PNS dan PPPK, Teknis Pengadaan Aparatur Sipil Negara (CPNS&PPPK), Surat Edaran Menteri Kelautan Perikanan terkait Tenaga Non ASN, serta hukuman disiplin bagi ASN.

PENGADUAN PPN PEMANGKAT

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
UNIT KERJA : PPN PEMANGKAT
PERIODE BULAN JANUARI - JUNI TAHUN 2023

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanjuit		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#6861901	Website : Lapor.go.id	Januari 2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	Pengendapan lumpur kolam pelabuhan pemangkat sehingga mengganggu pross tambat labuh kapal.	Rahasia	Anam Tofani	Uhir	Terkait rencana pengerukan lumpur kolam, saat ini sedang dalam tahap proses pengajuan.	Proses	Masih dalam proses
2	#6861883	Website : Lapor.go.id	Maret 2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	Pagar dermaga pelabuhan pemangkat mengalami kerusakan sehingga mengganggu aktivitas untuk tambat kapal.	Rahasia	Anam Tofani	Uhir	Aduan masyarakat terkait kerusakan pagar dermaga telah ditindaklanjuti dan sudah diperbaiki, sehingga pagar dermaga telah berfungsi seperti sedia kala.	Tuntas	
3	#6861853	Website : Lapor.go.id	1 Apr 2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	Jembatan drainase mampet sehingga mengganggu aktivitas di sekitar kios ikan	Rahasia	Anam Tofani	Uhir	aduan masyarakat terkait jalan drainase sudah ditindak lanjuti dan drainase sudah diperbaiki kembali. Sehingga jembatan drainase sudah berfungsi seperti sedia kala.	Tuntas	
4	#6861808	Website : Lapor.go.id	Mei 2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	Dermaga di pelabuhan pemangkat mengalami kerusakan karena tidak ada border.	Rahasia	Anam Tofani	Uhir	Terkait kerusakan dermaga sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai.	Tuntas	
5	#6823168	Website : Lapor.go.id	Juni 2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	Aduan terkait Ada beberapa jalan yang rusak di wilayah pelabuhan terutama yang didepan gudang ikan. Sehingga kadang membentuk genangan air dan mengganggu para pejalan.	Rahasia	Anam Tofani	Uhir	Pengaduan terkait jalan yang rusak sudah ditindaklanjuti. Dan telah selesai dikerjakan. Sehingga tidak ada genangan air lagi dan tidak mengganggu aktivitas di pelabuhan.	Tuntas	
6	#6821692	Website : Lapor.go.id	Juni 2023	Pengaduan tidak berkadar pengawasan	Penerangan lampu di PPN Pemangkat masih kurang sehingga menyulitkan proses bongkar ikan pada malam hari.	Haji Afan - Pemilik Kios Ikan	Anam Tofani	Uhir	Pengaduan terkait penerangan lampu di wilayah pelabuhan sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai diproses.	Tuntas	

LAYANAN SPANDUK PELAYANAN



PERMINTAAN INFORMASI

Data Permintaan Informasi PPN Pemangkat Tahun 2023 :

Buku Register Informasi PPN Pemangkat Tahun 2023

No	Tgl	Nama	Nomor Kontak	Fasilitas	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Format Informasi		Jenis Pemohonan		Keperluan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
							Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengunjungi	Meminta Salinan			Pembuatan dan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	11/01/2023	Andi Novamoni	081343179875	BPS Sambas	Permintaan data trywulanat produksi ikan	Untuk membuat data statistik terkait produksi ikan di wilayah Kabupaten Sambas	√			√	Informasi diberikan	-	11/01/2023	-	-	
2	Mei 2023	Eda Sarna		Poltekink ATP	Meminta data Surat Perintah Berlayar	Untuk rekomendasi surat untuk penyaluran BBM Subsidi	√			√	Informasi diberikan	-	Mei 2023	-	-	
3	Junji 2023	Adi		Pengurus Kapal	Meminta data Surat Perintah Berlayar	Untuk rekomendasi surat untuk penyaluran BBM Subsidi	√			√	Informasi diberikan	-	Junji 2023	-	-	
4	01/06/2023	Yusufli	081322706898	Mahasiswa ITB Bandung	Survei	Untuk mengetahui terkait produk perikanan di PPN Pemangkat		√	√	√	Informasi diberikan	-	01/06/2023	-	-	
5	10/06/2023	Fajar Syarif	082312011414	PT. LAPS	Mencari informasi tentang regulasi	Untuk mendapatkan regulasi terkait PPN Pemangkat		√	√	√	Informasi diberikan	-	10/06/2023	-	-	

ANAK MAGANG / PKL

Penerimaan anak magang / PKL bertujuan untuk mendukung Pengembangan Keterampilan dan pemahaman organisasi. Melalui pengembangan Keterampilan siswa dan mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan bidang studi atau karir mereka, seperti keterampilan komunikasi, analitis, pemecahan masalah, dan keterampilan teknis tertentu. Melalui pemahaman Organisasi siswa dan mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana sebuah organisasi beroperasi, termasuk struktur organisasi, budaya perusahaan, dan proses kerja yang terlibat.

No	Instansi	Jumlah (orang)	Periode Magang/PKL
1	SMK N 1 Pemangkat	3	10 Januari - 10 Februari 2023
2	Universitas Tanjungpura	3	13 Februari - 9 Juni 2023
3	Poltek AUP BRSDM KKP	2	20 Februari - 20 Mei 2023
4	Poltek AUP BRSDM KKP	3	10 Mei - 23 Juni 2023
5	Poiteknik Negeri Pontianak	36	29 Mei - 21 Juli 2023
6	SMK Filafeldia	6	26 Juni - 26 September 2023
7	Universitas Tanjungpura	2	3 Juli - 4 Agustus 2023
8	Poltek AUP BRSDM KKP	3	14 Agustus - 13 Oktober 2023
9	Universitas Tanjungpura	7	14 Agustus - 10 Desember 2023
10	Universitas Tanjungpura	8	15 Agustus - 9 Desember 2023

BAB VI

PENUTUP

6.1 PENUTUP

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan beberapa penghargaan yang didapatkan.

Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahun 2023 menyajikan capaian program dan target pada Indikator Kinerja selama tahun 2023. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut telah dilakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh kinerja PPN Pemangkat telah sesuai dengan tugas dan fungsi unit/satuan kerja, memastikan pengukuran kinerja yang menghasilkan data kinerja yang objektif, valid dan reliable dan perubahan target kinerja sebagai dampak dari kondisi eksternal yang mengharuskan adanya perubahan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian kinerja anggaran PPN Pemangkat Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	%
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pemangkat	IKS.01	Penerimaan PNBPN di PPN Pemangkat (Rp. Juta)	1.000	1.133,46	113,35
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat Meningkat	IKS.02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pemangkat (Ton)	8.750	13.228	120
3	Pengelolaan PPN Pemangkat yang Berdaya Saing	IKS.03	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi (Persen)	100	100	100
		IKS.04	Tingkat Kinerja PPN Pemangkat (Nilai)	83	88	106,02
		IKS.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (Persen)	80	100	120
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di PPN Pemangkat yang Optimal	IKS.06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	75	175	120
		IKS.07	Nilai Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)	30,01	83,71	120
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pemangkat	IKS.08	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	50	450	120
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pemangkat	IKS.09	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	10	17,78	120
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	IKS.10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	75	90,90	120
		IKS.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Pemangkat (Persen)	75	100	120
		IKS.12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja di PPN Pemangkat (Nilai)	93	97,19	104,51
		IKS.13	Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Indeks)	80	88,83	111,04
		IKS.14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Pemangkat (Persen)	77,50	81,88	105,65
		IKS.15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)	77,50	93,75	120
		IKS.16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Nilai)	93,75	93,99	100,26
		IKS.17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Persen)	82	83,50	101,83
		IKS.18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Pemangkat	88,21	90,68	102,80

Sumber : Tim Keuangan PPN Pemangkat

Lampiran 2. Penganggaran Kegiatan PPN Pemangkat TA. 2023

Kode	Satker/Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)
239991	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	12.426.857.000
HB	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.555.253.000
HB.2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	276.200.000
HB.2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.788.263.000
HB.2339	Pengendalian Penangkapan Ikan	8.000.000
HB.2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	134.170.000
WA	Program Dukungan Manajemen	9.220.224.000
WA.2342	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	9.220.224.000

Sumber : Tim Keuangan PPN Pemangkat

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Per Kegiatan TA. 2023

Kode Anggaran	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa (Rp)
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	276.200.000	271.082.000	98.15	5.117.200
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2.788.263.000	2.773.770.983	99.48	14.492.017
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	6.265.000	78.31	1.735.000
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	134.170.000	131.845.300		2.324.700
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	9.220.224.000	9.128.772.087		91.451.913
TOTAL		12.426.857.000	12.311.736.170		115.120.830

Sumber : Tim Keuangan PPN Pemangkat

Lampiran 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja TA. 2023

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentasi Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pegawai	4.747.704.000	4.736.498.502	99.76	11.205.498
2	Barang	6.522.073.000	6.419.596.400	98.43	102.476.600
3	Modal	1.157.080.000	1.155.641.268	99.88	1.438.732
Total		12.426.857.000	12.311.736.170	99.07	115.120.830

Sumber : Tim Keuangan PPN Pemangkat

Lampiran 5. Pelayanan SPB Periode Tahun 2023

No	Bulan	SPB 2023
1	Januari	171
2	Februari	121
3	Maret	130
4	April	120
5	Mei	166
6	Juni	151
7	Juli	173
8	Agustus	172
9	September	185
10	Oktober	173
11	November	193
12	Desember	145
	Jumlah	1.900

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 6. Pelayanan Log book Periode Tahun 2023

No	Bulan	Log book 2023
1	Januari	63
2	Februari	61
3	Maret	57
4	April	50
5	Mei	87
6	Juni	74
7	Juli	101
8	Agustus	83
9	September	89
10	Oktober	74
11	November	78
12	Desember	59
	Jumlah	876

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 7. Pelayanan Penerbitan SKKP Periode Tahun 2023

No	Bulan	Mekanisme Pembaruan		Jumlah
		Pembaharuan	Reguler	
1	Januari	63	-	63
2	Februari	56	-	56
3	Maret	39	-	39
4	April	12	-	12
5	Mei	58	-	58
6	Juni	23	-	23
7	Juli	69	-	69
8	Agustus	-	5	5
9	September	66	3	69
10	Oktober	220	-	225
11	November		4	4
12	Desember		9	9
	Jumlah	606	26	632

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 8. Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Periode Tahun 2023

No	Bulan	SHTI 2023
1	Januari	38
2	Februari	38
3	Maret	38
4	April	12
5	Mei	78
6	Juni	46
7	Juli	48
8	Agustus	32
9	September	9
10	Oktober	52
11	November	0
12	Desember	151
	Jumlah	542

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 9. Pelayanan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Periode Tahun 2023

No	Bulan	PKL 2023
1	Januari	77
2	Februari	95
3	Maret	122
4	April	137
5	Mei	196
6	Juni	186
7	Juli	224
8	Agustus	224
9	September	273
10	Oktober	275
11	November	282
12	Desember	222
	Jumlah	2.313

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 10. Asuransi Nelayan Periode Tahun 2023

**PROGRES KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ASURANSI NELAYAN)
TAHUN 2023**

No	Sampai Dengan Bulan	Jumlah Peserta (Orang)
1	Januari	4.027
2	Februari	4.040
3	Maret	4.052
4	April	4.108
5	Mei	4.189
6	Juni	4.239
7	Juli	4.301
8	Agustus	4.356
9	September	4.403
10	Oktober	4.474
11	November	4.497
12	Desember	4.501

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 11. Frekuensi Kunjungan Kapal Periode Tahun 2023

No	Bulan	PKL 2023
1	Januari	59
2	Februari	132
3	Maret	144
4	April	116
5	Mei	216
6	Juni	115
7	Juli	230
8	Agustus	177
9	September	169
10	Oktober	187
11	November	176
12	Desember	113
	Total	1.915

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 12. Frekuensi Kapal Bongkar Periode Tahun 2023

No	Bulan	PKL 2023
1	Januari	59
2	Februari	80
3	Maret	73
4	April	52
5	Mei	107
6	Juni	113
7	Juli	109
8	Agustus	101
9	September	99
10	Oktober	100
11	November	151
12	Desember	88
	Total	1.096

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 13. Data Kapal yang diinspeksi Periode Tahun 2023

No	Bulan	Tahun 2023 (Kapal)
1	Januari	88
2	Februari	62
3	Maret	58
4	April	56
5	Mei	80
6	Juni	79
7	Juli	67
8	Agustus	77
9	September	84
10	Oktober	93
11	November	100
12	Desember	70
	Total	914

Sumber : Kesyahbandaran PPN Pemangkat

Lampiran 14. SK Daftar Pelabuhan Binaan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PELABUHAN PERIKANAN BINAAN PELABUHAN PERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi dan efektivitas pembinaan operasional pelabuhan perikanan perintis milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis daerah, dan pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Pelabuhan Perikanan Binaan Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

MUHAMMAD ZAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


Trian Yunanda

No.	Pelabuhan Perikanan	Provinsi	Kabupaten/Kota	WPPNRI	Kelas Pelabuhan Perikanan
8	PP. Barelang (PT.MGGS)	Kepulauan Riau	Kota Batam	711	
9	PP. Telaga Pungur (PT.SYS)	Kepulauan Riau	Kota Batam	711	
Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat					
10	PPP Muara Sungai Baturusa	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	711	PPP
11	PP. Kurau	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	711	
12	PPI Sungai Selan	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	711	PPI
13	PP. Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	711	
14	PPI Sungsang	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	711	PPI
15	PP. Kuala Tungkal	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	711	
16	PP. Nipah Panjang	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	711	
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat					
17	PP. Selakau	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	711	
18	PP. Kuala Singkawang	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	711	
19	PP. Sungai Duri	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	711	
20	PP. Kuala Mempawah	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	711	
21	PPP Sungai Rengas	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	711	PPP
22	PP. Sungai Jawi	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	711	



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

JL. PENJAJAP TIMUR, PEMANGKAT
KABUPATEN SAMBAS
KALIMANTAN BARAT



kkp.go.id/djpt/ppnpemangkat



ppn.pemangkat@kkp.go.id



(0562)244113